



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



BSPJI Palembang



LAPORAN KEUANGAN- UNAUDITED

2024

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG

2024



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PALEMBANG
TA 2024**

KATA PENGANTAR

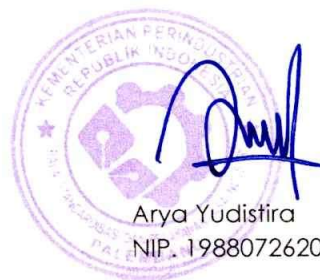
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BSPJI Palembang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BSPJI Palembang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 12 Februari 2025
Kepala BSPJI Palembang
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Arya Yudistira
NIP. 198807262010121004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	XI
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
II. NERACA.....	4
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	7
A. PENJELASAN UMUM.....	7
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS.....	7
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	9
A.3. BASIS AKUNTANSI.....	10
A.4. DASAR PENGUKURAN.....	10
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	10
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	21
B. 1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA.....	24
B. 2. BELANJA NEGARA.....	26
B. 3. BELANJA PEGAWAI.....	28
B. 4. BELANJA BARANG.....	29
B. 4.1 BELANJA BARANG PENANGANAN PANDEMI COVID-19.....	32
B. 5. BELANJA MODAL.....	32
B. 5.1 BELANJA MODAL TANAH.....	33
B. 5.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN.....	34
B. 5.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN.....	35
B. 5.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN.....	35
B. 5.5 BELANJA MODAL LAINYA.....	36
B. 5.6. BELANJA BANTUAN SOSIAL.....	36
C. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN NERACA.....	38
C. 1. KAS BENDAHARA PENGELUARAN.....	38

C. 2. KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN.....	38
C. 3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS.....	39
C. 4. PIUTANG	39
C. 5. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR).....	40
C. 6. BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN.....	41
C. 7. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH-PIUTANG LANCAR.....	41
C. 8. BELANJA DIBAYAR DI MUKA.....	42
C. 9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA.....	42
C. 10. PERSEDIAAN.....	43
C. 11. TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR).....	44
C. 12. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN.....	44
C. 13. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG.....	44
C. 14. TANAH.....	45
C. 15. PERALATAN DAN MESIN.....	45
C. 16. GEDUNG DAN BANGUNAN.....	53
C. 17. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN.....	54
C. 18. ASET TETAP LAINNYA.....	55
C. 19. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP).....	55
C. 20. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP.....	56
C. 21. ASET TAK BERWUJUD.....	56
C. 22. ASET LAIN - LAIN.....	57
C. 23. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA.....	65
C. 24. UANG MUKA DARI KPPN.....	65
C. 25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA.....	66
C. 26. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA.....	67
C. 27. UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN.....	69
C. 28. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA.....	70
C. 29. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR.....	70
C. 30. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG.....	70
C. 31. UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI.....	70
C. 32. EKUITAS.....	71

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	72
D. 1. PENDAPATAN OPERASIONAL.....	72
D.1.1. PENDAPATAN PERPAJAKAN.....	72
D.1.2. PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK.....	72
D. 2. BEBAN OPERASIONAL.....	75
D.2.1. BEBAN PEGAWAI.....	75
D.2.2. BEBAN PERSEDIAAN.....	79
D.2.3. BEBAN BARANG DAN JASA.....	80
D.2.4. BEBAN PEMELIHARAAN.....	83
D.2.5. BEBAN PERJALANAN DINAS.....	85
D.2.6. BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT.....	87
D.2.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL.....	87
D.2.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI.....	87
D.2.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH.....	89
D. 3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL.....	89
D. 4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL.....	90
D. 5. POS LUAR BIASA.....	91
D. 6. SURPLUS/DEFISIT LO.....	91
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	92
E. 1. EKUITAS AWAL.....	92
E. 2. SURPLUS (DEFISIT) LO.....	92
E. 3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	92
E. 4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS.....	92
E. 4.1 PENYESUAIAN NILAI ASET.....	92
E. 4.2 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN.....	93
E. 4.3 KOREKSI ATAS REKLAFISIKASI.....	93
E. 4.4 SELISIH REVALUASI ASET TETAP.....	93
E. 4.5 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI.....	93
E. 4.6 KOREKSI LAIN LAIN.....	94
E. 5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS.....	95
E. 5.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL).....	95
E. 5.2 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL).....	95
E. 5.3 TRANSFER MASUK/TRANSFER KELUAR.....	95
E. 5.4 TRANSFER KELUAR.....	96
E. 5.5 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN	

PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG.....	97
E. 6. EKUITAS AKHIR.....	97
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	98
F. 1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA.....	98
F. 2. PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN.....	98

Tabel 21	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 31	38
Tabel 22	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Per 31 Desember 2024 dan 31	39
Tabel 23	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Per 31 Desember 2024 dan 31	39
Tabel 24	: Rincian Mutasi Piutang per Per 31 Desember 2024	40
Tabel 25	: Rincian Bagian Lancar TP/TGR	41
Tabel 26	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	42
Tabel 27	: Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	42
Tabel 28	: Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	43
Tabel 29	: Rincian Persediaan Per Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember	44
Tabel 30	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	45
Tabel 31	: Rincian Tanah per Per 31 Desember 2024	46
Tabel 32	: Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Per 31 Desember 2024	46
Tabel 33	: Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per Per 31 Desember	47
Tabel 34	: Rincian Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin per Per 31 Desember 2024	49
Tabel 35	: Rincian Penggunaan Kembali BMN Per Per 31 Desember 2024	49
Tabel 36	: Rincian Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin per Per 31 Desember 2024	50
Tabel 37	: Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Per 31 Desember	50
Tabel 38	: Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per Per 31 Desember 2024	54
Tabel 39	: Rincian Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan Per Per 31 Desember 2024	54
Tabel 40	: Rincian Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan Per Per 31 Desember 2024	54
Tabel 41	: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per Per 31 Desember 2024	55
Tabel 42	: Rincian Perolehan Lainnya Per Per 31 Desember 2024	55
Tabel 43	: Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Per 31 Desember 2024	56

Tabel 44	: Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per Per 31 Desember 2024	56
Tabel 45	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Per 31 Desember	57
Tabel 46	: Mutasi Aset Tak Berwujud per Per 31 Desember 2024	58
Tabel 47	: Mutasi Aset Lain-Lain per Per 31 Desember 2024	58
Tabel 48	: Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Per Per 31 Desember 2024	59
Tabel 49	: Rincian Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Per Per 31 Desember 2024	62
Tabel 50	: Rincian Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan Per Per 31 Desember 2024	65
Tabel 51	: Rincian Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan Per Per 31 Desember 2024	65
Tabel 52	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per Per 31 Desember 2024	66
Tabel 53	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per Per 31 Desember 2024	67
Tabel 54	: Rincian Penerimaan Diterima Dimuka Per Per 31 Desember 2024	68
Tabel 55	: Rincian Utang yang Belum Ditagihkan Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	70
Tabel 56	: Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	71
Tabel 57	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	74
Tabel 58	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 September 2023	74
Tabel 59	: Rincian Beban Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	76
Tabel 60	: Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	77
Tabel 61	: Rincian perbedaan Beban Pegawai pada LRA dan LO Tahun Anggaran 2024	79
Tabel 62	: Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	80

Tabel 63	: Rincian Perbedaan Persediaan pada LRA dan LO Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	81
Tabel 64	: Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	82
Tabel 65	: Rincian Perbedaan Belanja/Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO	83
Tabel 66	: Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	85
Tabel 67	: Rincian Perbedaan Belanja/Beban Pemeliharaan Pada LRA dan LO per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	86
Tabel 68	: Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	87
Tabel 69	: Rincian Belanja/Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	87
Tabel 70	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	89
Tabel 71	: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	90
Tabel 72	: Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	91
Tabel 73	: Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	89
Tabel 74	: Rincian Beban Luar Biasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	90
Tabel 75	: Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	90
Tabel 76	: Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per Per 31 Desember 2024	93
Tabel 77	: Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2024	94
Tabel 78	: Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2024	94
Tabel 79	: Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per Per 31 Desember 2024	95
Tabel 80	: Rincian Transfer Masuk Per Per 31 Desember 2024	96
Tabel 81	: Rincian Transfer Keluar Per Per 31 Desember 2024	96
Tabel 82	: Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Per Per 31 Desember 2024	97

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I: LAPORAN HASIL REKON

- Berita Acara Rekonsiliasi Antara SAKTI-SPAN Per Juli 2024
- Berita Acara Rekonsiliasi Antara SAKTI-SPAN Per Agustus 2024
- Berita Acara Rekonsiliasi Antara SAKTI-SPAN Per September 2024
- Berita Acara Rekonsiliasi Antara SAKTI-SPAN Per Oktober 2024
- Berita Acara Rekonsiliasi Antara SAKTI-SPAN Per November 2024
- Berita Acara Rekonsiliasi Antara SAKTI-SPAN Per Desember 2024

LAMPIRAN II: LAPORAN-LAPORAN PENDUKUNG

- SK Pengelola Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024
- Revisi Pagu DIPA Tahun Anggaran 2024
- Lampiran Penyusutan
- Lampiran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Berita Acara Stock Opname Persediaan
- Laporan Barang Persediaan
- Daftar Jurnal Penyesuaian (SAKTI)
- Memo Penyesuaian
- Telaah LK yang di Tandatangani Oleh Penelaah
- Rincian Piutang (Format DJPPR Kemenkeu)
- Lampiran TK/TM
- LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Periode Terakhir
- Lampiran Belanja COVID (Format Surat DJPB)
- Lampiran Hibah
- Rekap PNPB dari Periode Terakhir
- Lampiran Capaian Kinerja dari Aplikasi SMART DJA
- Lampiran Capaian Output per Desember (Sakti)
- Lampiran Daftar Kapitalisasi

LAMPIRAN III : LAPORAN PENGGUNA BARANG

- Laporan Posisi Persediaan di Neraca
- Laporan Posisi BMN di Neraca
- Laporan Barang Intrakomtabel
- Laporan Barang Ekstrakomtabel
- Laporan Barang Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel
- Laporan Penyusutan Intrakomtabel
- Laporan Penyusutan Ekstrakomtabel
- Laporan Barang Aset Tak Berwujud
- Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
- Laporan Barang Hilang
- Laporan Barang Rusak Berat
- Laporan Barang Bersejarah
- Laporan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya
- Laporan CRBMN Gabungan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel

LAMPIRAN IV : LAPORAN CETAKAN MONSAKTI

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Realisasi Pendapatan
- Laporan Realisasi Belanja Akun Covid-19
- Laporan Realisasi Belanja
- Laporan Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Neraca Percobaan Saldo Awal Akrua
- Laporan Neraca Percobaan Kas
- Laporan Neraca Percobaan Akrua

LAMPIRAN V : LAPORAN PENDUKUNG LAINNYA

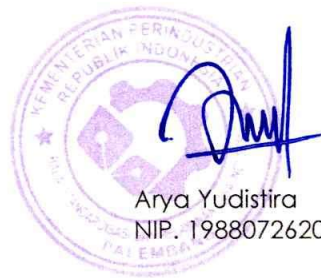
- Risalah Lelang
- SIP (Surat Izin Penghunian) Rumah Negara

**PERNYATAANTANGGUNG JAWAB
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan BSPJI Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 12 Februari 2025
Kepala BSPJI Palembang
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Arya Yudistira
NIP. 198807262010121004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BSPJI Palembang Tahunan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp5.196.245.780,00** atau mencapai **157,46 persen** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.300.000.000,00. Realisasi pendapatan sebesar Rp5.196.245.780,00 terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp2.072.000,00; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp3.441.780,00; Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian sebesar Rp4.463.947.000,00 atau 146,65 persen; dan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp722.880.000,00 atau mencapai 282,38 persen; Pendapatan lain-lain dari Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp3.905.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar **Rp20.461.334.412,00** atau mencapai **99,64 persen** dari alokasi anggaran sebesar Rp20.535.869.000,00. Realisasi Belanja Negara sebesar Rp20.461.334.412,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp9.509.260.635,00 atau mencapai 99,96 persen; Belanja Barang sebesar Rp7.411.206.683,00 atau mencapai 99,05 persen; dan Belanja Modal sebesar Rp3.540.867.094,00 atau mencapai 99,99 persen.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp42.974.412.274,00** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp506.448.339,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp42.467.963.935,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp975.905.904,00 dan Rp41.998.506.370,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp4.995.740.780,00** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp19.255.374.677,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp14.259.633.897,00)**. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **(Rp24.443.875,00)** dan **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp14.284.077.772,00)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar **Rp41.019.470.324,00** dikurangi Defisit-LO sebesar **(Rp14.284.077.772,00)**, ditambah koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Koreksi nilai aset non revaluasi sebesar **(Rp1.974.814,00)**. Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp15.265.088.632,00** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp41.998.506.370,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	TA 2024			%	TA 2023
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di Bawah)		Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
I. Pendapatan Perpajakan						
1. Pajak Dalam Negeri						
2. Pajak Perdagangan Internasional						
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak						
1. Pendapatan Sumber Daya Alam						
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan						
3. Pendapatan BLU						
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1	3.300.000.000,00	5.196.245.780,00	1.896.245.780,00	157,46%	4.251.954.463,00
III. Pendapatan Hibah						
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		3.300.000.000,00	5.196.245.780,00	1.896.245.780,00	157,46%	4.251.954.463,00
B. BELANJA NEGARA	B.2					
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT						
1. Belanja Pegawai	B.3	9.512.859.000,00	9.509.260.635,00	(3.598.365,00)	99,96%	7.924.684.394,00
2. Belanja Barang	B.4	7.481.943.000,00	7.411.206.683,00	(70.736.317,00)	99,05%	7.113.024.938,00
3. Belanja Modal	B.5	3.541.067.000,00	3.540.867.094,00	(199.906,00)	99,99%	432.695.340,00
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang						
5. Belanja Subsidi						
6. Belanja Hibah						
7. Belanja Bantuan Sosial						
8. Belanja Lain-lain						
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa						
1. Transfer ke Daerah						
a. Dana Perimbangan						
1. Dana Transfer Umum						
a. Dana Bagi Hasil						
b. Dana Alokasi Umum						
2. Dana Transfer Khusus						
a. Dana Alokasi Khusus Fisik						
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
b. Dana Insentif Daerah						
c. Dana Keistimewaan DIY						
d. Dana Otonomi Khusus						
2. Dana Desa						
3. Hibah Kepada Daerah						
JUMLAH BELANJA		20.535.869.000,00	20.461.334.412,00	(74.534.588,00)	99,64%	15.470.404.672,00
c. PEMBIAYAAN						

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palembang, Februari 2025
Kepala BSPJI Palembang


Arya Yudistira
NIP. 198807262010121004

II. NERACA

BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	134.625.000,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0,00	0,00
Piutang	C.4	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lancar	C.7	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.8	2.821.487,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	24.092.000,00	5.329.000,00
Persediaan	C.10	344.909.852,00	295.185.085,00
Jumlah Aset Lancar		506.448.339,00	300.514.085,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.13	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.14	24.648.662.000,00	24.648.662.000,00
Peralatan dan Mesin	C.15	26.112.968.237,00	24.137.651.524,00
Gedung dan Bangunan	C.16	16.026.688.999,00	16.026.688.999,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	71.880.300,00	49.425.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.18	281.871.254,00	281.871.254,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	C.20	(24.674.106.855,00)	(24.123.781.504,00)
Jumlah Aset Tetap		42.467.963.935,00	41.020.517.273,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.22	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00
JUMLAH ASET		42.974.412.274,00	41.321.031.358,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang muka dari KPPN	C.24	134.625.000,00	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	406.725.904,00	80.297.034,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	434.555.000,00	221.264.000,00
Utang yang Belum Ditagihkan	C.27	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.28	0,00	0,00
Beban yang masih harus dibayar	C.29	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.30	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		975.905.904,00	301.561.034,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.31	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		975.905.904,00	301.561.034,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.32	41.998.506.370,00	41.019.470.324,00
JUMLAH EKUITAS		41.998.506.370,00	41.019.470.324,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.974.412.274,00	41.321.031.358,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Palembang, Februari 2025
Kepala BSPJI Palembang


Arya Yudistira
NIP. 198807262010121004

III. LAPORAN OPERASIONAL
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1		
Pendapatan Perpajakan	D.1.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.2	4.995.740.780,00	4.303.498.038,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.995.740.780,00	4.303.498.038,00
BEBAN OPERASIONAL	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	9.837.145.484,00	7.958.779.944,00
Beban Persediaan	D.2.2	769.081.910,00	682.546.173,00
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	3.079.954.948,00	3.053.680.612,00
Beban Pemeliharaan	D.2.4	987.388.284,00	1.233.386.544,00
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	2.498.324.008,00	2.130.249.282,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	D.2.7	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.8	2.083.480.043,00	1.726.391.068,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.9	0,00	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		19.255.374.677,00	16.785.033.623,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.3	(14.259.633.897,00)	(12.481.535.585,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET			
Pendapatan Pelepasan Aset		2.072.000,00	61.234.567,00
Beban Pelepasan Aset		30.420.875,00	37.121.211,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET		(28.348.875,00)	24.113.356,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.905.000,00	30.372.608,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		3.905.000,00	30.372.608,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.4	(24.443.875,00)	54.485.964,00
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(14.284.077.772,00)	(12.427.049.621,00)
POS LUAR BIASA	D.5		
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.6	(14.284.077.772,00)	(12.427.049.621,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palembang, Februari 2025
Kepala BSP/II Palembang

Arya Yudistira
NIP. 198807262010121004

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	41.019.470.324,00	41.826.150.636,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14.284.077.772,00)	(12.427.049.621,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	(1.974.814,00)	146.409.101,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	0,00	0,00
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(1.974.814,00)	146.409.101,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	15.265.088.632,00	11.473.960.208,00
DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	E.5.1	(5.196.245.780,00)	(4.251.954.463,00)
DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	E.5.2	20.461.334.412,00	15.470.404.672,00
TRANSFER MASUK	E.5.3	0,00	255.509.999,00
TRANSFER KELUAR	E.5.4	0,00	0,00
PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG/PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG	E.5.5	0,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		979.036.046,00	(806.680.312,00)
EKUITAS AKHIR	E.6	41.998.506.370,00	41.019.470.324,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Palembang, Februari 2025
Kepala BSPJI PalembangArya Yudistra
NIP. 198807262010121004

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
3. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, dan verifikasi di bidang industri;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri;
6. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran,

kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pada Tahun Anggaran 2020-2024, Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0.
3. Meningkatnya kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri.
4. Terselenggaranya urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang berkelanjutan.
5. Tercapainya pengawasan Internal yang efektif dan efisien.
6. Terwujudnya ASN BSPJI Palembang yang profesional.
7. Penguatan sistem layanan public
8. Penguatan layanan prima dan akuntabilitas organisasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun anggaran 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas.
 - Jumlah tenan *incubator* berbasis teknologi yang terbentuk target 4 tenan.
 - Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri target 3 Kegiatan Kolaborasi.
2. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi target 30 persen.
 - Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri target 15 persen.
 - Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri target 20 ruang lingkup.
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 40 persen.
3. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah

ditindaklanjuti oleh satker Target 40 Persen.

4. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri target 3.6 Indeks.
5. Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional
 - Rata-rata indeks profesionalitas ASN target 75 Indeks
 - Nilai disiplin pegawai target nilai 90
6. Penguatan Layanan Publik
 - Nilai minimal indeks layanan publik target nilai B
7. Penguatan Akuntabilitas Organisasi
 - Nilai minimal akuntabilitas kinerja target nilai 83
 - Nilai minimal laporan keuangan target nilai 90.

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI merupakan aplikasi yang dirancang untuk menjadi sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI terdiri dari beberapa modul, meliputi Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul GL dan Pelaporan, Modul Piutang, Modul Administrasi, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Penganggaran. Semua modul telah terintegrasi antara modul satu dengan modul lainnya. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Belanja, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SAKTI juga menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang menerapkan Basis Akrua! dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan

akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
2. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian diakui setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
 - b) Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan yang dilaksanakan.
 - c) Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi yang dilaksanakan.
3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Piutang dan Persentase Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal	100%

	Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 1. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

1. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
2. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4. Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi berupa jalan, jembatan, dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revalues adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survey lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
5. Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh Aset Tetap yang lebih akurat, andal dan wajar.
6. Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutanya adalah nol. Dalam hal ini Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut

diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

7. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
8. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
9. Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
10. Implementasi Metode Penilaian Persediaan *First in First out* (FIFO)

Sejak penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual tahun 2015 hingga tahun 2020, Pemerintah menggunakan metode HPT dalam penilaian persediaan. Mulai Tahun Anggaran 2021, Pemerintah akan menerapkan metode penilaian persediaan FIFO sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

- dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

1. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

2. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
3. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
4. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

5. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar

sumber daya ekonomi pemerintah.

2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berkas Akrua Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak

dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan DIPA BSPJI Palembang telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 19 kali. Kesembilan belas revisi DIPA sebagaimana dijelaskan dapat dilihat dalam rincian berikut:

Tabel 4
Daftar Revisi Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Revisi	Pagu Anggaran (Rp)	Digital Stamp	Keterangan
1	Pagu Awal	15.709.996.000,00	8724 2437 0126 0974	-
2	Revisi ke-1	17.890.946.000,00	1803 7140 2068 1018	Penambahan pagu Dapati dan Belanja Modal Prioritas Nasional
3	Revisi ke-2	17.890.946.000,00	2672 0865 7768 0779	adanya Revisi Anggaran Antar KRO dalam Rangka Pemenuhan belanja operasional
4	Revisi ke-3	17.890.946.000,00	2672 0865 7768 0779	Revisi pemuktahiran data hasil Revisi POK
5	Revisi ke-4	17.890.946.000,00	2672 0865 7768 0779	Revisi pemuktahiran data hasil Revisi POK
6	Revisi ke-5	17.890.946.000,00	2672 0865 7768 0779	Revisi pemuktahiran data hasil Revisi POK
7	Revisi ke-6	17.890.946.000,00	2672 0865 7768 0779	Revisi pemuktahiran data hasil Revisi POK
8	Revisi ke-7	17.890.946.000,00	2672 0865 7768 0779	Revisi pemuktahiran data hasil Revisi POK
9	Revisi ke-8	18.786.882.000,00	7144 4265 6381 0187	Revisi DIPA BSKJI TA.2024 terkait Relaksasi Blokir Automatic Adjustment dan Pergeseran Belanja Pegawai Antar eselon I TA 2024

10	Revisi ke-9	18.786.882.000,00	7144 4265 6381 0187	Revisi pemuktahiran data hasil Revisi POK
11	Revisi ke-10	18.786.882.000,00	7144 4265 6381 0187	Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK dan Revisi Halaman III DIPA
12	Revisi ke-11	19.233.812.000,00	8085 5898 9426 2934	- Revisi Halaman III DIPA - Penambahan Pagu PNBPN dalam rangka kelebihan realisasi penerimaan target PNBPN untuk keperluan belanja Bahan, Barang, Modal dan Peningkatan SDM
13	Revisi ke-12	19.233.812.000,00	0208 0209 2583 1305	Revisi <i>Self Blocking</i> Perjalanan Dinas
14	Revisi ke-13	19.802.069.000,00	0462 2624 0936 2443	- Revisi Halaman III DIPA - Penambahan Pagu PNBPN dalam rangka kelebihan realisasi penerimaan target PNBPN untuk keperluan belanja Bahan, Barang, Modal dan Peningkatan SDM
15	Revisi ke-14	19.802.069.000,00	0462 2624 0936 2443	Revisi Pemutakhiran POK
16	Revisi ke-15	19.802.069.000,00	0462 2624 0936 2443	Revisi Pemutakhiran POK
17	Revisi ke-16	20.535.869.000,00	0909 7019 6397 5371	- Revisi Halaman III DIPA - Penambahan Pagu PNBPN dalam rangka kelebihan realisasi penerimaan target PNBPN untuk keperluan belanja Bahan, Barang, Modal dan Peningkatan SDM
18	Revisi ke-17	20.535.869.000,00	0909 7019 6397 5371	Revisi Pemutakhiran POK
19	Revisi ke-18	20.535.869.000,00	0909 7019 6397 5371	Revisi Pemutakhiran POK
20	Revisi ke-19	20.535.869.000,00	0909 7019 6397 5371	Revisi Pemutakhiran POK

Adapun rincian pagu Tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam rincian berikut

Tabel 5
Rincian Pagu Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	8.616.923.000,00	9.512.859.000,00
Belanja Barang	5.778.962.000,00	7.481.943.000,00
Belanja Modal	1.314.111.000,00	3.541.067.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Jumlah Belanja	15.709.996.000,00	20.535.869.000,00

Pada DIPA awal tidak dialokasikan anggaran untuk Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar **Rp0,00**. Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 hanya dialokasikan pada tahun anggaran 2023. Berikut rincian penggunaan akun khusus penanganan Covid-19:

Tabel 6
Rincian Penggunaan Pagu Penanganan Pandemi Covid-19

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	Anggaran	Anggaran Setelah Revisi	Belanja	% Realisasi Anggaran
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
522192	Belanja Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

- Penjelasan mengenai anggaran penanganan Pandemi COVID-Pemulihan Ekonomi Nasional**

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang

dilaksanakan oleh COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pada tahun anggaran 2024, BSPJI Palembang tidak memiliki anggaran penanganan Pandemi COVID-Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Realisasi

Pendapatan

Penerimaan Negara

Bukan Pajak Lainnya

Rp5.196.245.780,00

B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp5.196.245.780,00** atau mencapai **157,46 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp3.300.000.000,00**. Pendapatan BSPJI Palembang terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	2.072.000,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	3.441.780,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	3.044.000.000,00	4.467.971.000,00	146,78
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau pelatihan	256.000.000,00	722.880.000,00	282,38
Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	3.905.000,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Kotor	3.300.000.000,00	5.200.269.780,00	157,58
Pengembalian Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	0,00	(4.024.000,00)	0,00
Jumlah	3.300.000.000,00	5.196.245.780,00	157,46

Adapun perbandingan realisasi penerimaan per 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Penerimaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.072.000,00	61.234.567,00	(96,62)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.441.780,00	6.748.288,00	(49,00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	4.467.971.000,00	3.621.214.000,00	23,38
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau pelatihan	722.880.000,00	441.795.000,00	63,62
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0,00	85.000.000,00	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	3.905.000,00	36.312.608,00	(89,25)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Kotor	5.200.269.780,00	4.252.304.463,00	22,29
Pengembalian Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	(4.024.000,00)	(350.000,00)	1.049,71
Jumlah	5.196.245.780,00	4.251.954.463,00	22,21

Realisasi Penerimaan Per 2024 mengalami Kenaikan **22,21 persen** dibandingkan 2023. Kenaikan Penerimaan pada Tahun anggaran 2024 disebabkan:

1. Adanya pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan
2. Adanya peningkatan pendapatan dari sektor pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi.

3. Layanan jasa teknis baik pengujian sampel uji maupun sertifikasi produk sudah dilakukan secara normal.
4. Pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi pendapatan pada tahun 2024 dikarenakan BSPJI Palembang sudah beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dimana kegiatan audit sertifikasi dan pengambilan contoh (air dan udara) dilakukan secara *on site* sehingga meningkatkan pendapatan.

Realisasi Belanja

Negara

Rp20.461.334.412,00

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja BSPJI Palembang pada periode 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp20.461.334.412,00** atau **99,64** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp20.535.869.000,00**. Di BSPJI Palembang tidak terdapat realisasi belanja dari sumber dana dengan *tagging* Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Periode 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.512.859.000,00	9.509.263.058,00	99,96
Belanja Barang	7.481.943.000,00	7.411.206.683,00	99,05
Belanja Modal	3.541.067.000,00	3.540.867.094,00	99,99
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Kotor	20.535.869.000,00	20.461.336.835,00	99,64
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	(2.423,00)	0,00
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	20.535.869.000,00	20.461.334.412,00	99,64

Berikut perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9.509.260.635,00	7.924.684.394,00	20,00
Belanja Barang	7.411.206.683,00	7.113.024.938,00	4,19
Belanja Modal	3.540.867.094,00	432.695.340,00	718,33
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah	20.461.334.412,00	15.470.404.672,00	32,26

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Realisasi Belanja Tahun anggaran 2024 mengalami Kenaikan sebesar **32,26 persen**. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan pada tahun ini dikarenakan terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang baru.
2. Belanja modal mengalami kenaikan hingga 718,33 persen dikarenakan adanya belanja AAS(*Atomic Absorption Spectroscopy*) untuk keperluan Laboratorium.

Seiring dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, pada tahun 2024 BSPJI Palembang tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Pada Tahun Anggaran 2024 BSPJI Palembang tidak memiliki Ketidakesuaian Akun belanja vs persediaan/BMN yang belum diralat dan tidak memiliki Pagu Minus belum direvisi. Selain itu, BSPJI Palembang memiliki Rincian Realisasi Capaian Output dapat dilihat pada lampiran. Capaian Output Stategis melalui aplikasi monev Pelaksanaan Anggaran yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Penjelasan lebih lanjut atas

laporan realisasi capaian output strategis dan Ketidaksesuaian Akun dapat dilihat pada bagian F.2 Pengungkapan Penting Lainnya.

Belanja Pegawai
Rp9.509.260.635,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai BSPJI Palembang pada Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp9.509.260.635,00** dan **Rp7.924.684.394,00**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai periode 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan sebesar **20,00 persen** dari periode 31 Desember 2023.

Berikut penjelasan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024:

1. Adanya Penambahan Pegawai PPPK sehingga memengaruhi realisasi belanja pegawai.
2. Tidak terdapat dampak Pandemi Covid-19 terhadap penurunan belanja pegawai karena BSPJI Palembang sudah menerapkan 100% pegawai WFO pada tahun 2024 serta banyaknya pelaksanaan kegiatan perkantoran.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.966.850.558,00	3.689.375.720,00	7,52

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	684.561.607,00	129.520.070,00	428,54
Belanja Lembur PNS	251.206.000,00	201.462.000,00	24,69
Belanja Lembur PPPK	43.152.000,00	8.207.000,00	425,80
Belanja Tunjangan Kinerja PNS	3.918.830.061,00	3.822.206.245,00	2,53
Belanja Tunjangan Kinerja PPPK	644.662.832,00	84.494.650,00	662,96
Jumlah Belanja Kotor	9.509.263.058,00	7.935.265.685,00	19,84
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.423)	(10.581.291)	(99,98)
Jumlah Belanja	9.509.260.635,00	7.924.684.394,00	20,00

Belanja Barang
Rp7.411.206.683,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp7.411.206.683,00** dan **Rp7.113.024.938,00**. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **4,19 persen** dari Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023. Berikut penjelasan realisasi belanja barang per 31 Desember 2024:

1. Belanja barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 sudah tidak dialokasikan lagi disebabkan kondisi Covid-19 sudah mulai membaik dan sudah tidak diperbolehkan lagi menggunakan akun penanganan Covid-19 sehingga memengaruhi realisasi belanja barang.
2. Belanja barang mengalami kenaikan pada tahun ini dikarenakan seluruh perjalanan pimpinan dan operasional yang diselenggarakan oleh pihak internal ataupun eksternal Kementerian sudah dapat dilaksanakan.
3. Belanja untuk pemeliharaan peralatan dan mesin mengalami Kenaikan karena banyak pemeliharaan yang dilakukan pada TA 2024.

Tabel 12
Perbandingan Belanja Barang
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	703.079.020,00	712.937.755,00	(1,38)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45.552.000,00	47.396.675,00	(3,89)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	74.000,00	(100,00)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	106.032.000,00	228.110.000,00	(53,52)
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID 19	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan	440.572.107,00	191.382.808,00	130,20
Belanja Honor Output Kegiatan	16.000.000,00	20.800.000,00	(23,08)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,00	24.050.000,00	(100,00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	846.467.145,00	708.644.011,00	19,45
Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Langganan Listrik	493.995.533,00	505.563.053,00	(2,29)
Belanja Langganan Telepon	17.594.691,00	17.007.290,00	3,45
Belanja Langganan Air	40.702.420,00	31.662.168,00	28,55
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25.093.323,00	0,00	100,00
Belanja Sewa	0,00	42.000.000,00	(100,00)
Belanja Jasa Profesi	129.785.000,00	101.990.000,00	27,25

Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	75.339.000,00	49.007.500,00	53,73
Belanja Jasa Lainnya	990.487.320,00	1.077.687.898,00	(8,09)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	100.000,00	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385.888.072,00	685.093.889,00	(43,67)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.178.045,00	539.268.609,00	8,70
Belanja barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.116.999,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Biasa	2.337.237.424,00	1.986.281.850,00	17,67
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.986.584,00	37.740.000,00	56,30
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota – Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.100.000,00	85.500.000,00	19,42
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	20.727.432,00	(100,00)
JUMLAH BELANJA KOTOR	7.411.206.683,00	7.113.024.938,00	4,19
Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA BARANG	7.411.206.683,00	7.113.024.938,00	4,19

Belanja Barang
Penanganan
Pandemi COVID-19
Rp0,00

B.4.1 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Satker BSPJI Palembang mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar **Rp0,00**. Anggaran tersebut terserap sebesar **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja (akun Spesifik) untuk penanganan Covid-19
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Pagu Setelah Revisi	Realisasi
52113 1	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
52219 2	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Belanja penanganan Covid-19 di BSPJI Palembang digunakan untuk belanja sebagai berikut:

1. Membiayai kegiatan-kegiatan di masa pandemi seperti belanja jasa untuk *rapid test/antigen*.

Pada Tahun Anggaran 2024 belanja untuk penanganan Covid sudah tidak digunakan lagi.

• Penjelasan Belanja Barang untuk penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional

BSPJI Palembang tidak memiliki pagu belanja barang untuk penanganan Pandemi COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional.

Belanja Modal
Rp3.540.867.094,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3.540.867.094,00** dan **Rp432.695.340,00**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berikut perbandingan realisasi

belanja modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.540.867.094,00	432.695.340,00	718,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	3.540.867.094,00	432.695.340,00	718,33
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.540.867.094,00	432.695.340,00	718,33

Realisasi Belanja Modal pada periode 31 Desember 2024 mengalami Kenaikan sebesar **718,33 persen** dibandingkan periode 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya belanja Peralatan dan mesin berupa AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) untuk keperluan Laboratorium sebesar Rp1.980.000.000,00.

Dampak Covid-19 terhadap Belanja Modal:

- Untuk Tahun anggaran 2024 tidak ada pemotongan Pagu Belanja modal yang di alokasikan ke Belanja modal-Penanganan Covid-19. Sehingga pada Tahun anggaran 2024 tidak ada dampak dari Covid-19.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pada Tahun anggaran 2024 tidak ada alokasi untuk Belanja Modal Tanah. Pada Tahun anggaran 2024 tidak ada dampak dari Covid-19 pada belanja modal tanah di BSPJI Palembang.

Belanja Modal Tanah
Rp0,00

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp3.540.867.094,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.540.867.094,00 dan Rp432.695.340,00. Pada periode 31 Desember 2024 belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar 718,33 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode 31 Desember 2023. Pada Tahun anggaran 2024 tidak ada dampak dari Covid-19 pada belanja modal Peralatan dan Mesin di BSPJI Palembang.

Tabel 16
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Alat Besar	6.569.002,00	0,00	100,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.488.150,00	0,00	100,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	209.115.842,00	48.777.000,00	328,72
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	3.178.494.100,00	233.918.340,00	1258,81
Komputer	139.200.000,00	150.000.000,00	(7,20)
Jumlah Belanja Kotor	3.540.867.094,00	432.695.340,00	718,33
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan	0,00	0,00	0,00

Mesin			
Jumlah Belanja	3.540.867.094,00	432.695.340,00	718,33

**Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pada tahun 2024, tidak terdapat alokasi untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Pada Tahun anggaran 2024 tidak ada dampak dari Covid-19 pada belanja modal Gedung dan Bangunan di BSPJI Palembang.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Pengembangan melalui KDP	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

**Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp0,00**

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pada Tahun anggaran 2024 tidak dialokasikan untuk belanja modal, jalan, irigasi dan Jaringan dan tidak ada dampak dari Covid-19 pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Lainnya
Rp0,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pada tahun anggaran 2024 tidak dialokasikan anggaran untuk untuk belanja modal lainnya. Pada Tahun anggaran 2024 tidak ada dampak dari Covid-19 pada belanja modal lainnya di BSPJI Palembang.

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial
Rp0,00

B.5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko

sosial dan bersifat selektif. BSPJI Palembang untuk Tahun anggaran 2024 tidak ada alokasi untuk Belanja Bantuan Sosial.

Pada Tahun anggaran 2024 tidak ada dampak dari Covid-19 pada belanja Bantuan Sosial di BSPJI Palembang.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	0,00	0,00

**Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp134.625.000,00**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp134.625.000,00** dan **Rp0,00** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Sedangkan rincian kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut dengan rekening Koran per 31 Desember 2024 terlampir.

Tabel 21
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	134.625.000,00	0,00
Bank	0,00	0,00
Kuitansi Yang Belum Dipertanggungjawabkan	0,00	0,00
Selisih (lain-lain)	0,00	0,00
Jumlah	134.625.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja per 31 Desember 2024 sebesar **Rp134.625.000,00** merupakan sisa tambahan uang persediaan yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2024. Sisa tambahan uang persediaan dimaksud telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2025 sesuai dengan NTPN 9DE7D7NAPH18PMV0.

**Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Kas di Bendahara

Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Periode 31 Desember 2024 Rekening bendahara penerimaan tidak terdapat saldo di Bendahara Penerimaan dengan Rekening Koran per 31 Desember 2023 terlampir.

Tabel 22
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Uang Tunai	0,00	0,00
Bank	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas lainnya dan Setara Kas
Rp0,00

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

C.4 Piutang

Saldo Piutang PNPB per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan

Piutang
Rp0,00

Rp0,00. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan tetapi belum diselesaikan pembayarannya.

Saldo Piutang bukan pajak Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar

Rp0,00 dan **Rp0,00.** Piutang Lainnya merupakan jenis piutang yang tidak termasuk ke dalam jenis piutang PNBPN.

BSPJI Palembang tidak mempunyai piutang PNBPN selama Tahun Anggaran 2024 sehingga jumlah debitor dan jumlah piutang sebesar Rp0. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada piutang dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 dan selama masa pandemi Covid-19 pekerjaan tidak akan dilakukan sebelum pelanggan melunasi pembayaran tagihan dan/atau pelanggan sudah membayar semua tagihan terhadap jasa pelayanan publik sesuai dengan kontrak kerjasama. Rincian Piutang pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Mutasi Piutang
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah debitor	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang PNBPN	0	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0	0,00	0,00
Jumlah	0	0,00	0,00

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00.** Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bagian Lancar TP	0,00	0,00
Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,00

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Penyisihan piutang dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar sebesar Rp0. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00

Belanja Dibayar di Muka Rp2.821.487,00

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp2.821.487,00** dan **Rp0,00**. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pembayaran Belanja Barang atas Website Wix.com dan Aplikasi Renderforest	2.821.487,00	0,00
Jumlah	2.821.487,00	0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp24.092.000,00

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp24.092.000,00** dan **Rp5.329.000,00** merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Nama	Jenis Pendapatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT. Baker Hughes Indonesia	Pengujian	336.000,00	5.329.000,00
PT. Baker Hughes Indonesia	Pengujian	6.848.000,00	0,00
PT. Baker Hughes Indonesia	Pengujian	1.977.000,00	0,00

PT. Baker Hughes Indonesia	Pengujian	3.774.000,00	0,00
Cv Gemilang Segar Prima	Pengujian	8.766.000,00	0,00
PT. Banyan Koalindo Lestari	Pengujian	2.391.000,00	0,00
Jumlah		24.092.000,00	5.329.000,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp24.092.000,00 merupakan penerimaan atas pelayanan pengujian yang telah dilakukan dan telah terbit LHU pada bulan Desember 2024 tetapi pembayaran belum dilakukan karena pembayaran sesuai kontrak bersangkutan belum jatuh tempo.

Persediaan
Rp344.909.852,00

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp344.909.852,00** dan **Rp295.185.085,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2024 sudah tidak ada Persediaan untuk penanganan Pandemi COVID. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	196.977.792,00	126.842.276,00
Bahan untuk Pemeliharaan	7.213.300,00	11.741.600,00
Suku Cadang	0,00	83.189.125,00
Bahan Baku	139.010.490,00	71.347.720,00
Persediaan Lainnya	1.708.270,00	2.064.364,00
Jumlah	344.909.852,00	295.185.085,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Daftar barang persediaan dan berita acara *stock opname* untuk 31 Desember 2024 terlampir di daftar lampiran.

**Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp0,00**

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

**Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,00**

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

**Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0,00**

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 30
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyi sihan	Nilai Penyisihan
TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-

Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00

C.14 Tanah

Tanah
Rp 24.648.662.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BSPJI Palembang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp24.648.662.000,00** dan **Rp24.648.662.000,00**. Tidak ada Mutasi tambah dan kurang pada aset tetap tanah pada tahun 2024.

Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Tanah sebagai aset tetap di BSPJI Palembang. Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Koreksi Perubahan Kuantitas pada Aset Tetap Berupa Tanah.

Tabel 31
Rincian Tanah per 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

No	Uraian Lokasi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
1	(2.01.01.01.001.1) Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I. Jl. Jenderal Sudirman Lr. Jasa Bhakti Rt/Rw 28/10 20 Ilir IT I Kota Palembang	208	1.473.969.000,00
2	(2.01.01.01.001.2) Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I. Jl. Rimbo Kemuning No. 48 RT/RW 23/05 Ario Kemuning Kota Palembang	298	1.538.346.000,00
3	(2.01.01.01.001.3) Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I. Jl. Rimbo Kemuning No. 40 RT/RW 23/05 Ario Kemuning Kota Palembang	347	1.697.140.000,00
4	(2.01.01.04.001.1) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah. Jl. Kol. H. Barlian KM.9 Palembang	5.299	4.572.686.000,00
5	(2.01.01.04.001.2) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah. Jl. Kapten A. Rivai No. 92 Palembang	772	15.366.521.000,00
		6.924	24.648.662.000,00

Peralatan dan Mesin
Rp26.112.968.237,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp26.112.968.237,00** dan **Rp24.137.651.524,00**. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	24.137.651.524,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	3.540.867.094,00
Reklasifikasi Masuk	443.189.700,00
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	1.748.878.00,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi keluar	(443.189.700,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(3.314.428.380,00)
Saldo per 31 Desember 2024	26.112.968.237,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(20.444.342.560,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	5.668.625.677,00

Rincian Mutasi Tambah penambahan dengan pembelian untuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Pompa Air	1 Buah	6.569.002,00
2	Tool Kit Box	3 Buah	7.488.150,00
3	Lemari Besi/Metal	8 Buah	33.270.000,00
4	Lemari Kayu	1 Buah	3.663.000,00
5	Rak Besi	5 Buah	8.000.000,00
6	Filling Cabinet Besi	3 Buah	7.125.300,00
7	Locker	3 Buah	4.484.100,00
8	Lemari Display	1 Buah	1.900.000,00
9	Laci Box	3 Buah	4.914.000,00
10	CCTV – Camera Control Television System	1 Buah	7.999.992,00
11	LCD Projector/Infocus	2 Buah	15.600.000,00
12	Meja Kerja Kayu	2 Buah	2.775.000,00
13	Kursi Besi/Metal	37 Buah	62.630.750,00
14	Sice	1 Buah	4.773.000,00
15	Tempat Tidur Kayu	2 Buah	8.680.200,00
16	Kasur/Spring Be	1 Buah	3.163.500,00
17	Air Cleaner	4 Buah	7.675.000,00

18	A.C. Split	2 Buah	9.600.000,00
19	Kompore Gas (Alat Dapur)	1 Buah	1.339.000,00
20	Rice Cooker (Alat Dapur)	2 Buah	2.316.000,00
21	Rak Piring Aluminium	1 Buah	1.250.000,00
22	Televisi	2 Buah	3.500.000,00
23	Dispenser	10 Buah	14.457.000,00
24	Timbangan Elektronik	1 Buah	2.150.000,00
25	Sediment Sampler	1 Buah	16.000.000,00
26	Diesel Smoke Tester	1 Buah	47.000.000,00
27	Anemometer Portable Digital	1 Buah	25.500.000,00
28	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1 Buah	90.000.000,00
29	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1 Buah	37.000.000,00
30	Furnace	1 Buah	78.000.000,00
31	Refrigerator	2 Buah	4.600.000,00
32	Stabilizer	1 Buah	2.929.000,00
33	Atomic Absorption Spectro	1 Buah	1.980.000.000,00
34	Lemari Asam	1 Buah	167.000.000,00
35	Food Trolley	5 Buah	9.200.000,00
36	Weather Meter	1 Buah	15.500.000,00
37	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Buah	21.500.000,00
38	Microwave Oven	1 Buah	1.929.000,00
39	PH Meter Digital	1 Buah	16.699.950,00
	Plankton Net (Alat Laboratorium Pertanian)	2 Buah	2.200.000,00
	Liquid Dispenser	1 Buah	11.743.000,00
	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	4 Buah	13.800.000,00
	Sieve Shaker Mesh	1 Buah	1.640.000,00
	GPS Insight	1 Buah	5.650.000,00
	Water Sampler (General Laboratory Tool)	1 Buah	6.900.000,00
	Rpm-meter	1 Buah	26.300.000,00
	Ball Mill	1 Buah	149.850.000,00
	Lab Water Purifier/Demineralizer	1 Buah	147.500.000,00

	Pipetter	1 Buah	9.650.000,00
	High Volume Air Sampler	1 Buah	175.000.000,00
	Alat laboratorium kualitas udara lainnya	1 Buah	75.700.000,00
	Lux Meter	1 Buah	18.500.000,00
	Densimeter	1 Buah	19.053.150,00
	P.C. Unit	2 Buah	31.150.000,00
	Lap Top	1 Buah	11.750.000,00
	Note Book	2 Buah	37.000.000,00
	Tablet PC	1 Buah	18.500.000,00
	Auto Switcg/Data Switch	2 Buah	4.500.000,00
	Printer (Peralatan personal computer)	5 Buah	17.000.000,00
	Scanner (Peralatan personal computer)	2 Buah	13.000.000,00
	Wireless access point	3 Buah	6.300.000,00
Jumlah			Rp3.540.867.094,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Pembelian sebesar Rp3.540.867.094,00. Dan untuk Rincian Mutasi Tambah dengan Reklasifikasi Masuk untuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Reklasifikasi Masuk Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Portable Generating Set	2 Unit	8.378.000,00
2	Stationary Generating Set	1 Unit	37.238.000,00
3	Lemari kayu	1 Buah	60.397.700,00
4	Lemari asam	1 Buah	103.376.000,00
5	Lap top	16 buah	233.800.000,00
Jumlah			Rp443.189.700,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Reklasifikasi Masuk sebesar Rp443.189.700,00. Dan untuk Rincian Mutasi Tambah dengan Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif untuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Penggunaan Kembali BMN Per 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Falling Number	1 Buah	103.376.000,00
2	Alat uji gas buang	1 Buah	103.750.000,00

3	Electrolytic equipment	1 Buah	102.339.000,00
4	Alat laboratorium proses pembuatan cetakan lainnya	1 Dummy	158.600.000,00
5	Alat laboratorium proses teknologi kulit, karet lainnya	1 dummy	1.280.813.000,00
Jumlah			Rp1.748.878.000,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp1.748.878.000,00. Sedangkan untuk Rincian Mutasi Kurang dengan Transaksi Reklasifikasi Keluar untuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Reklasifikasi Keluar Per 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Af Generator tone generator	1 buah	37.238.000,00
2	Lemari penyimpanan	1 buah	60.397.700,00
3	Falling number	1 buah	103.376.000,00
4	Genset	2 buah	8.378.000,00
5	Note book	16 buah	233.800.000,00
Jumlah			Rp443.189.700,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Reklasifikasi Keluar sebesar Rp443.189.700,00. Sedangkan untuk Rincian Mutasi Kurang dengan Penghentian Aset dari Penggunaan untuk peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Per 31 Desember 2024
 (dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Portable Generating Set	1 Unit	4.961.000,00
2	Mesin Press Hidrolik & Punch	1 Buah	605.000,00
3	Mesin Rol	1 Buah	4.650.000,00
4	Mesin Crystal Growing	1 Buah	17.950.000,00
5	Crt Tester	1 Buah	8.355.000,00
6	PH Meter (Alat Ukur Unicersal)	1 Buah	12.500.000,00
7	Alat Ukur Lainnya	1 dummy	3.985.000,00
8	Alat Pengukur Temperatur	2 Buah	5.945.000,00
9	Falling Number	1 Buah	103.376.000,00

10	Lemari Kayu	5 Buah	11.822.000,00
11	Locker	1 Buah	1.500.000,00
12	Lemari Display	1 Buah	1.500.000,00
13	Mesin Absensi	2 Buah	32.960.000,00
14	Alat Pencetak Label	14 Buah	12.672.000,00
15	Lampu-lampu Kristal	4 Buah	16.200.000,00
16	Meja Kerja Kayu	2 Buah	1.588.000,00
17	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Buah	860.000,00
18	A.C. Split	4 Buah	18.925.000,00
19	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 Buah	1.603.000,00
20	Motor Driver	4 Buah	12.845.000,00
21	Meja Cetak Tangan	1 Buah	7.250.000,00
22	Mesin Cetak Listrik Sheet	1 Buah	9.975.000,00
23	Mesin Cetak	5 Buah	3.725.000,00
24	Mesin Press	1 Buah	11.450.000,00
25	Peralatan Cetak Lainnya	1 dum my	21.800.000,00
26	Timbangan Elektronik	2 buah	4.730.000,00
27	Alat Pengukur Kadar Air	2 buah	4.250.000,00
28	Water Test	1 buah	8.363.800,00
29	Elektrik Compression Tester	2 buah	31.400.000,00
30	Abration Machine	1 buah	2.626.000,00
31	Alat Pemeriksa SP Gavity Air	1 buah	2.164.000,00
32	Straight Edge	1 buah	1.351.000,00
33	Viscosimeter (Alat Laboratorium Aspal, cat dan Kimia)	2 buah	13.986.000,00
34	Rubber Mallet Atgentylar	1 buah	7.475.000,00
35	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik)	2 buah	2.135.000,00
36	Alat Uji Tekan Hydrotastic	1 buah	26.900.000,00
37	Alat Uji Gas Buang	2 buah	115.650.000,00
38	Burete	1 buah	2.500.000,00
39	Blender	1 buah	848.000,00
40	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	1 buah	750.000,00

41	Lampu Natrium	1 buah	6.240.000,00
42	Raw Water Kit	1 buah	1.186.000,00
43	Pengaduk	1 buah	440.000,00
44	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 buah	5.154.000,00
45	Electrolytic Equipment	1 buah	102.339.000,00
46	Balance Gram	1 buah	14.068.000,00
47	Desicator	4 buah	676.000,00
48	Gas Orsat Apparatus	1 buah	3.993.000,00
49	Reaktor Anaerobic	1 buah	2.600.000,00
50	Packing Test	1 buah	6.000.000,00
51	Alat Pemanas	1 buah	4.300.000,00
52	Cooler (alat laboratorium makanan)	1 buah	315.000,00
53	Agitator	1 buah	3.100.000,00
54	Alat laboratorium proses pembuatan cetakan lainnya	1 buah	158.600.000,00
55	Surface grinding machine	1 buah	3.099.000,00
56	Mesin bending	1 buah	90.039.000,00
57	Alat laboratorium proses teknologi kulit, karet lainnya	1 buah	1.280.813.000,00
58	Alat uji penyerapan air / udara	1 buah	53.120.000,00
59	Beater unit (mesin penggiling)	1 buah	4.775.000,00
60	Anaerobic jar	1 buah	20.850.000,00
61	Crusher/mixer	1 buah	147.232.800,00
62	Fermentor (alat laboratorium pertanian)	10 buah	4.230.000,00
63	Filter holder (stainless steel 1000 ml)	1 buah	12.200.000,00
64	Fumehood	1 buah	199.903.000,00
65	Kompas gas (alat laboratorium pertanian)	1 buah	785.000,00
66	Rubber moisture tester	1 buah	2.300.000,00
67	Turbidity meter	1 buah	11.539.000,00
68	Alat pengukur massa jenis	1 buah	12.450.000,00
69	Alat pengolah air limbah	1 buah	53.250.281,00
70	Alat pembuat lembaran kertas	1 buah	4.789.000,00

71	Fermentor (alat laboratorium lainnya)	1 buah	22.421.000,00
72	Alat penyaring	1 buah	3.475.000,00
73	Hallow cathode lamp	10 buah	61.830.000,00
74	Anak timbangan	1 buah	16.000.000,00
75	thermocouple	1 buah	2.830.000,00
76	Unit alat laboratorium lainnya	5 buah	57.295.000,00
77	Specific gravitometer	1 buah	24.950.000,00
78	Immersion heating coil	2 buah	3.750.000,00
79	Infrared lamp	1 buah	37.931.000,00
80	High volume air sampler	1 buah	33.700.000,00
81	Data input	1 buah	15.000.000,00
82	Air pollution tester	1 buah	3.020.000,00
83	Hydrogen gas generator	1 buah	95.850.000,00
84	Air sampler	2 buah	48.135.000,00
85	Alat laboratorium kualitas udara lainnya	1 buah	7.620.000,00
86	Peralatan umum lainnya	1 buah	40.747.500,00
87	Syringe pump calibrator	2 buah	3.800.000,00
88	Thermocouple switch box	2 buah	1.490.000,00
89	Lap Top	5 buah	43.922.000,00
90	Putar	3 buah	26.145.000,00
Jumlah			Rp3.314.428.381,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp3.314.428.381,00.

- **Aset Tetap untuk penanganan pandemi Covid-19**

Pada Periode TA 2024 BSPJI Palembang tidak memiliki transaksi apapun untuk perolehan Aset Tetap penanganan pandemi Covid-19.

- **Aset Tetap untuk penanganan pandemi Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

BSPJI Palembang tidak memiliki anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp16.026.688.999,00

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp16.026.688.999,00** dan **Rp16.026.688.999,00**. Pada Tahun Anggaran 2024 Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Gedung dan Bangunan sebagai aset tetap di BSPJI Palembang. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	16.026.688.999,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	181.086.000,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	181.086.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	16.026.688.999,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(4.193.030.696,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	11.833.658.303,00

Rincian Mutasi Tambah dengan Reklasifikasi Masuk untuk gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Reklasifikasi Masuk Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 Unit	181.086.000,00
Jumlah			181.086.000,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Reklasifikasi Masuk sebesar Rp181.086.000,00. Dan untuk Rincian Mutasi Kurang dengan Reklasifikasi Keluar untuk Gedung dan bangunan sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Reklasifikasi Keluar Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	181.086.000,00
Jumlah			181.086.000,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Reklasifikasi Keluar sebesar Rp181.086.000,00.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp71.880.300,00

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp71.880.300,00** dan **Rp49.425.000,00**. Pada Tahun Anggaran 2024 Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai aset tetap di BSPJI Palembang. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	49.425.000,00
Mutasi tambah:	
Perolehan lainnya	22.455.300,00
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	71.880.300,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(36.733.599,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	35.146.701,00

Rincian Mutasi Tambah dengan Transaksi Perolehan Lainnya untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Perolehan Lainnya Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Bangunan Tempat Penampungan Sampah Rumah Tangga	1 Unit	22.455.300,00
Jumlah			22.455.300,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Perolehan Lainnya sebesar Rp22.455.300,00.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp281.871.254,00

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp281.871.254,00** dan **Rp281.871.254,00**. Pada Tahun Anggaran 2024 Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Aset Tetap Lainnya sebagai aset tetap di BSPJI Palembang. Tidak ada transaksi untuk mutasi aset tetap lainnya. Berikut rincian mutasi Aset Tetap Lainnya:

Tabel 43
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	281.871.254,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	281.871.254,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	281.871.254,00

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp0,00

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pada Tahun Anggaran 2024 Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tanggal Pelaporan:

Tabel 44
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp24.674.106.855,00)**

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing **(Rp24.674.106.855,00)** dan **(Rp24.123.781.504,00)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Pada Tahun Anggaran 2024 Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp.)
Tanah	24.648.662.000,00	-	24.648.662.000,00
Peralatan dan Mesin	26.112.968.237,00	20.444.342.560,00	5.668.625.677,00
Gedung dan Bangunan	16.026.688.999,00	4.193.030.696,00	11.833.658.303,00
Jaringan	71.880.300,00	36.733.599,00	35.146.701,00
Aset Tetap Lainnya	281.871.254,00	-	281.871.254,00
Akumulasi Penyusutan	67.142.070.790,00	24.674.106.855,00	42.467.963.935,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Aset Tak Berwujud
Rp0,00**

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pada Tahun Anggaran 2024 Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Aset Tak Berwujud. Aset tak berwujud pada tahun 2024 merupakan pengembangan sistem informasi layanan untuk jasa layanan laboratorium. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi

terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	0,00
	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0,00

C.22 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Pada Tahun Anggaran 2024 Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Aset Lain-lain. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari AT ke AL	3.314.428.381,00
Pencatatan Pembatalan barang yang mau dihapuskan	1.748.878.000,00
Mutasi kurang:	
Pencatatan Barang Yang mau dihapuskan	3.314.428.381,00
Reklasifikasi dari AL ke AT	1.748.878.000,00
Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(0,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	00,00

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Rincian Mutasi tambah dengan

Transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya untuk Aset lain-lain sebagai berikut:

Tabel 48
Rincian Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Portable Generating Set	1 Unit	4.961.000,00
2	Mesin Press Hidrolik & Punch	1 Buah	605.000,00
3	Mesin Rol	1 Buah	4.650.000,00
4	Mesin Crystal Growing	1 Buah	17.950.000,00
5	Crt Tester	1 Buah	8.355.000,00
6	PH Meter (Alat Ukur Unicursal)	1 Buah	12.500.000,00
7	Alat Ukur Lainnya	1 dummy	3.985.000,00
8	Alat Pengukur Temperatur	2 Buah	5.945.000,00
9	Lemari Kayu	5 Buah	11.822.000,00
10	Locker	1 Buah	1.500.000,00
11	Lemari Display	1 Buah	1.500.000,00
12	Mesin Absensi	2 Buah	32.960.000,00
13	Alat Pencetak Label	14 Buah	12.672.000,00
14	Lampu-lampu Kristal	4 Buah	16.200.000,00
15	Meja Kerja Kayu	2 Buah	1.588.000,00
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Buah	860.000,00
17	A.C. Split	4 Buah	18.925.000,00
18	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 Buah	1.603.000,00
19	Motor Driver	4 Buah	12.845.000,00
20	Meja Cetak Tangan	1 Buah	7.250.000,00
21	Mesin Cetak Listrik Sheet	1 Buah	9.975.000,00
22	Mesin Cetak	5 Buah	3.725.000,00
23	Mesin Press	1 Buah	11.450.000,00
24	Peralatan Cetak Lainnya	1 dummy	21.800.000,00
25	Timbangan Elektronik	2 buah	4.730.000,00
26	Alat Pengukur Kadar Air	2 buah	4.250.000,00
27	Water Test	1 buah	8.363.800,00
28	Elektrik Compression Tester	2 buah	31.400.000,00

29	Abration Machine	1	buah	2.626.000,00
30	Alat Pemeriksa SP Gavity Air	1	buah	2.164.000,00
31	Straight Edge	1	buah	1.351.000,00
32	Viscosimeter (Alat Laboratorium Aspal, cat dan Kimia)	2	buah	13.986.000,00
33	Rubber Mallet Atgentyler	1	buah	7.475.000,00
34	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik)	2	buah	2.135.000,00
35	Alat Uji Tekan Hydrotastic	1	buah	26.900.000,00
36	Burete	1	buah	2.500.000,00
37	Blender	1	buah	848.000,00
38	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	1	buah	750.000,00
39	Lampu Natrium	1	buah	6.240.000,00
40	Raw Water Kit	1	buah	1.186.000,00
41	Pengaduk	1	buah	440.000,00
42	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	buah	5.154.000,00
43	Balance Gram	1	buah	14.068.000,00
44	Desicator	4	buah	676.000,00
45	Gas Orsat Apparatus	1	buah	3.993.000,00
46	Reaktor Anaerobic	1	buah	2.600.000,00
47	Packing Test	1	buah	6.000.000,00
48	Alat Pemanas	1	buah	4.300.000,00
49	Cooler (alat laboratorium makanan)	1	buah	315.000,00
50	Agitator	1	buah	3.100.000,00
51	Surface grinding machine	1	buah	3.099.000,00
52	Mesin bending	1	buah	90.039.000,00
53	Alat uji penyerapan air / udara	1	buah	53.120.000,00
54	Beater unit (mesin penggiling)	1	buah	4.775.000,00
55	Anaerobic jar	1	buah	20.850.000,00
56	Fermentor (alat laboratorium pertanian)	10	buah	4.230.000,00
57	Filter holder (stainless steel 1000 ml)	1	buah	12.200.000,00
58	Kompas gas (alat laboratorium pertanian)	1	buah	785.000,00

59	Rubber moisture tester	1	buah	2.300.000,00
60	Turbidity meter	1	buah	11.539.000,00
61	Alat pengukur massa jenis	1	buah	12.450.000,00
62	Alat pengolah air limbah	1	buah	53.250.281,00
63	Alat pembuat lembaran kertas	1	buah	4.789.000,00
64	Fermentor (alat laboratorium lainnya)	1	buah	22.421.000,00
65	Alat penyaring	1	buah	3.475.000,00
66	Hallow cathode lamp	10	buah	61.830.000,00
67	Anak timbangan	1	buah	16.000.000,00
68	thermocouple	1	buah	2.830.000,00
69	Unit alat laboratorium lainnya	5	buah	57.295.000,00
70	Specific gravitometer	1	buah	24.950.000,00
71	Immersion heating coil	2	buah	3.750.000,00
72	Infrared lamp	1	buah	37.931.000,00
73	High volume air sampler	1	buah	33.700.000,00
74	Data input	1	buah	15.000.000,00
75	Air pollution tester	1	buah	3.020.000,00
76	Hydrogen gas generator	1	buah	95.850.000,00
77	Air sampler	2	buah	48.135.000,00
78	Alat laboratorium kualitas udara lainnya	1	buah	7.620.000,00
79	Peralatan umum lainnya	1	buah	40.747.500,00
80	Syringe pump calibrator	2	buah	3.800.000,00
81	Thermocouple switch box	2	buah	1.490.000,00
82	Lap Top	5	buah	43.922.000,00
83	Putar	3	buah	26.145.000,00
84	Falling Number	1	Buah	103.376.000,00
85	Alat Uji Gas Buang	2	Buah	115.650.000,00
86	Electrolytic Equipment	1	Buah	102.339.000,00
87	Alat laboratorium proses pembuatan cetakan lainnya	1	Buah	158.600.000,00
88	Alat laboratorium proses teknologi kulit, karet lainnya	1	Buah	1.280.813.000,00
89	Crusher/Mixer	1	Buah	147.232.800,00

90	Fumehood	1	Buah	199.903.000,00
Jumlah				3.314.428.381,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp3.314.428.381,00. Dan untuk Rincian Mutasi Kurang dengan Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan untuk Aset lain-lain sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Per 31
Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Portable Generating Set	1 Unit	4.961.000,00
2	Mesin Press Hidrolik & Punch	1 Buah	605.000,00
3	Mesin Rol	1 Buah	4.650.000,00
4	Mesin Crystal Growing	1 Buah	17.950.000,00
5	Crt Tester	1 Buah	8.355.000,00
6	PH Meter (Alat Ukur Unicersal)	1 Buah	12.500.000,00
7	Alat Ukur Lainnya	1 dummy	3.985.000,00
8	Alat Pengukur Temperatur	2 Buah	5.945.000,00
9	Lemari Kayu	5 Buah	11.822.000,00
10	Locker	1 Buah	1.500.000,00
11	Lemari Display	1 Buah	1.500.000,00
12	Mesin Absensi	2 Buah	32.960.000,00
13	Alat Pencetak Label	14 Buah	12.672.000,00
14	Lampu-lampu Kristal	4 Buah	16.200.000,00
15	Meja Kerja Kayu	2 Buah	1.588.000,00
16	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 Buah	860.000,00
17	A.C. Split	4 Buah	18.925.000,00
18	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 Buah	1.603.000,00
19	Motor Driver	4 Buah	12.845.000,00
20	Meja Cetak Tangan	1 Buah	7.250.000,00
21	Mesin Cetak Listrik Sheet	1 Buah	9.975.000,00
22	Mesin Cetak	5 Buah	3.725.000,00
23	Mesin Press	1 Buah	11.450.000,00

24	Peralatan Cetak Lainnya	1	dummy	21.800.000,00
25	Timbangan Elektronik	2	buah	4.730.000,00
26	Alat Pengukur Kadar Air	2	buah	4.250.000,00
27	Water Test	1	buah	8.363.800,00
28	Electric Compression Tester	2	buah	31.400.000,00
29	Abration Machine	1	buah	2.626.000,00
30	Alat Pemeriksa SP Gavity Air	1	buah	2.164.000,00
31	Straight Edge	1	buah	1.351.000,00
32	Viscosimeter (Alat Laboratorium Aspal, cat dan Kimia)	2	buah	13.986.000,00
33	Rubber Mallet Atgentyler	1	buah	7.475.000,00
34	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin dan Listrik)	2	buah	2.135.000,00
35	Alat Uji Tekan Hydrotastic	1	buah	26.900.000,00
36	Burete	1	buah	2.500.000,00
37	Blender	1	buah	848.000,00
38	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	1	buah	750.000,00
39	Lampu Natrium	1	buah	6.240.000,00
40	Raw Water Kit	1	buah	1.186.000,00
41	Pengaduk	1	buah	440.000,00
42	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	buah	5.154.000,00
43	Balance Gram	1	buah	14.068.000,00
44	Desicator	4	buah	676.000,00
45	Gas Orsat Apparatus	1	buah	3.993.000,00
46	Reaktor Anaerobic	1	buah	2.600.000,00
47	Packing Test	1	buah	6.000.000,00
48	Alat Pemanas	1	buah	4.300.000,00
49	Cooler (alat laboratorium makanan)	1	buah	315.000,00
50	Agitator	1	buah	3.100.000,00
51	Surface grinding machine	1	buah	3.099.000,00
52	Mesin bending	1	buah	90.039.000,00
53	Alat uji penyerapan air / udara	1	buah	53.120.000,00

54	Beater unit (mesin penggiling)	1	buah	4.775.000,00
55	Anaerobic jar	1	buah	20.850.000,00
56	Fermentor (alat laboratorium pertanian)	10	buah	4.230.000,00
57	Filter holder (stainless steel 1000 ml)	1	buah	12.200.000,00
58	Kompas gas (alat laboratorium pertanian)	1	buah	785.000,00
59	Rubber moisture tester	1	buah	2.300.000,00
60	Turbidity meter	1	buah	11.539.000,00
61	Alat pengukur massa jenis	1	buah	12.450.000,00
62	Alat pengolah air limbah	1	buah	53.250.281,00
63	Alat pembuat lembaran kertas	1	buah	4.789.000,00
64	Fermentor (alat laboratorium lainnya)	1	buah	22.421.000,00
65	Alat penyaring	1	buah	3.475.000,00
66	Hallow cathode lamp	10	buah	61.830.000,00
67	Anak timbangan	1	buah	16.000.000,00
68	thermocouple	1	buah	2.830.000,00
69	Unit alat laboratorium lainnya	5	buah	57.295.000,00
70	Specific gravitometer	1	buah	24.950.000,00
71	Immersion heating coil	2	buah	3.750.000,00
72	Infrared lamp	1	buah	37.931.000,00
73	High volume air sampler	1	buah	33.700.000,00
74	Data input	1	buah	15.000.000,00
75	Air pollution tester	1	buah	3.020.000,00
76	Hydrogen gas generator	1	buah	95.850.000,00
77	Air sampler	2	buah	48.135.000,00
78	Alat laboratorium kualitas udara lainnya	1	buah	7.620.000,00
79	Peralatan umum lainnya	1	buah	40.747.500,00
80	Syringe pump calibrator	2	buah	3.800.000,00
81	Thermocouple switch box	2	buah	1.490.000,00
82	Lap Top	5	buah	43.922.000,00
83	Putar	3	buah	26.145.000,00
84	Falling Number	1	Buah	103.376.000,00

85	Alat Uji Gas Buang	2 Buah	115.650.000,00
86	Electrolytic Equipment	1 Buah	102.339.000,00
87	Alat laboratorium proses pembuatan cetakan lainnya	1 Buah	158.600.000,00
88	Alat laboratorium proses teknologi kulit, karet lainnya	1 Buah	1.280.813.000,00
89	Crusher/Mixer	1 Buah	147.232.800,00
90	Fumehood	1 Buah	199.903.000,00
Jumlah			3.314.428.381,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp3.314.428.381,00. Dan untuk Rincian Mutasi Tambah dengan Transaksi Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan untuk Aset lain-lain sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Falling Number	1 Unit	103.376.000,00
2	Alat uji gas buang	1 Buah	103.750.000,00
3	Electrolytic Equipment	1 Buah	102.339.000,00
4	Alat laboratorium proses pembuatan cetakan lainnya	1 Dumm y	158.600.000,00
5	Alat laboratorium proses teknologi kulit, karet lainnya	1 dummy	1.280.813.000,00
Jumlah			1.748.878.000,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp1.748.878.000,00. Dan untuk Rincian Mutasi Kurang dengan Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan untuk Aset lain-lain sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan Per
31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Falling Number	1 Unit	103.376.000,00
2	Alat uji gas buang	1 Buah	103.750.000,00
3	Electrolytic Equipment	1 Buah	102.339.000,00
4	Alat laboratorium proses pembuatan cetakan lainnya	1 dummy	158.600.000,00

5	Alat laboratorium proses teknologi kulit, karet lainnya	1 dummy	1.280.813.000,00
Jumlah			1.748.878.000,00

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 terdapat Transaksi Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp1.748.878.000,00.

**Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0,00**

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing **Rp0,00 dan Rp0,00**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap Yang Tidak digunakan	0,00	0,00	0,00
2	Software	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00	0,00

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**Uang Muka dari
KPPN
Rp134.625.000,00**

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp134.625.000,00 dan Rp0,00**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN seharusnya Rp0,00 pada akhir Tahun Anggaran, tetapi pada BSPJI Palembang terdapat sebesar Rp134.625.000,00 dikarenakan

bendahara terlambat menyetorkan sisa TUP ke Negara pada tanggal 31 Desember 2024. Sisa tambahan uang persediaan (TUP) dimaksud telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2025 sesuai dengan NTPN 9DE7D7NAPH18PMV0.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp406.725.904,00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp406.725.904,00** dan **Rp80.297.034,00**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor BSPJI Palembang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2024	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	361.980.399,00	Uang Makan PNS dan PPPK bulan Desember 2024 dan Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK bulan Desember 2024
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	39.857.149,00	Listrik bulan Desember 2024
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.272.191,00	Telepon bulan Desember 2024
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.616.165,00	Air bulan Desember 2024
Jumlah	406.725.904,00	

- **Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kewajiban**

Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada kewajiban di BSPJI Palembang. Hal ini dikarenakan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sudah dibayarkan.

**Pendapatan
Diterima di Muka
Rp434.555.000,00**

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp434.555.000,00** dan **Rp221.264.000,00**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya. namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi di bidang perindustrian yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian pendapatan diterima dimuka terlampir.

Tabel 54
Rincian Penerimaan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

No	Nama	Jenis Pendapatan	Jumlah
1	Koperasi Produsen Tirta Menumbing Sejahtera	Sertifikasi	13.750.000,00
2	CV. Sungai Intan	Sertifikasi	8.950.000,00
3	PT.Duta Putra Lexindo	Sertifikasi	800.000,00
4	PT Barokah Arsakha Putra	Sertifikasi	8.950.000,00
5	PT Barokah Arsakha Putra	Sertifikasi	7.050.000,00
6	PT Tirta Osmosis Sampurna	Sertifikasi	14.550.000,00
7	CV Abadi	Sertifikasi	9.950.000,00
8	CV Varia Indah Tirta	Sertifikasi	13.750.000,00
9	PT Afresh Indonesia	Sertifikasi	13.750.000,00
10	CV GEMILANG SEGAR PRIMA	Sertifikasi	14.850.000,00
11	IKM Pt.Rotte Factory Indonesia	Sertifikasi	11.250.000,00
12	PT Afresh Indonesia	Sertifikasi	800.000,00
13	PT Banyan Koalindo Lestari	Pengujian	1.950.000,00
14	PT Gadjah Ruku	Sertifikasi	15.200.000,00
15	CV Mawaddah Ummulyatama	Sertifikasi	13.750.000,00
16	PT Aneka Bumi Pratama	Sertifikasi	15.200.000,00
17	UD Rotix Surya	Sertifikasi	14.850.000,00
18	PT Hok Tong	Sertifikasi	12.750.000,00
19	PT STAR RUBBER	Sertifikasi	12.050.000,00
20	PT Sri Trang Lingga Indonesia	Sertifikasi	10.850.000,00

21	PT Darussalam Tegal Rejo Jaya Tirta	Sertifikasi	14.850.000,00
22	BLU Universitas Sriwijaya	Sertifikasi	11.950.000,00
23	PT. Sriwijaya Bara Logistic	pengujian	15.528.000,00
24	PT. Sriwijaya Bara Logistic	pengujian	1.650.000,00
25	PT. Sriwijaya Bara Logistic	pengujian	15.207.000,00
26	PT. Sriwijaya Bara Logistic	pengujian	1.190.000,00
27	PT. Sriwijaya Bara Logistic	pengujian	6.036.000,00
28	PT. Sriwijaya Bara Logistic	pengujian	870.000,00
29	PD Inti Garamsindo Persada	Sertifikasi	8.150.000,00
30	PT Agri Indomas	Sertifikasi	13.850.000,00
31	PT Inti Garam Cemerlang	Sertifikasi	9.950.000,00
32	PT Citra Golden Tunggal	Sertifikasi	13.750.000,00
33	Ericoffe	Sertifikasi	10.050.000,00
34	LSPro BSPJI Palembang / PD.Inti	Pengujian	1.426.000,00
35	LSPro BSPJI Palembang / PT. Citra Golden Tunggal	Pengujian	8.766.000,00
36	LSPro BSPJI Palembang / PT. Citra Golden Tunggal	Pengujian	8.766.000,00
37	LSPro BSPJI Palembang / PT. Inti Garam Cemerlang	Pengujian	1.426.000,00
38	PT. CS2 Pola Sehat	Pengujian	1.560.000,00
39	PT Tirta Investama	Pengujian	1.224.000,00
40	LSPro BSPJI Palembang / CV. Mawaddah Ummulyatama	Pengujian	5.844.000,00
41	PT Sukses Citra Pangan	Pengujian	1.772.000,00
42	CV. BOGA UTAMA (Amanda Brownies Palembang)	Pengujian	2.308.000,00
43	PT. Roesli Taher	pengujian	638.000,00
44	PD Sahang Mas	Sertifikasi	17.100.000,00
45	LSPro BSPJI Palembang / PD.SAHANG MAS	Pengujian	2.279.000,00
46	LSPro BSPJI Palembang / PD.SAHANG MAS	Pengujian	3.719.000,00
47	LSPro BSPJI Palembang / PT. Darusallam Tegal Rejo	Pengujian	5.844.000,00
48	PT. Trita Musi Prasada	Pengujian	1.860.000,00
49	PT. IOL INDONESIA	Pengujian	4.919.000,00
50	PT. Hokkan Deltapack Industri	Pengujian	1.468.000,00
51	PT. IOL INDONESIA	Pengujian	870.000,00

52	PT Sukses Citra Pangan	Pengujian	713.000,00
53	PT. Rizky Mitra Pangan	Pengujian	1.468.000,00
54	PT RAAFI AISKOTO FAMILI	Pengujian	2.111.000,00
55	PERUMDAM TIRTA SEJIRAN SETASON	Pengujian	7.340.000,00
56	PERUMDAM TIRTA SEJIRAN SETASON	Pengujian	7.340.000,00
57	PERUMDAM TIRTA SEJIRAN SETASON	Pengujian	644.000,00
58	Antonius Yudhis Hindriarsana	Pengujian	990.000,00
59	CV Sehat Sejahtera Enam Sembilan	Pengujian	677.000,00
60	PT. SANDABI INDAH LESTARI	Pengujian	1.154.000,00
61	PT. SANDABI INDAH LESTARI	Pengujian	1.374.000,00
62	PDAM Tirta Musi	Pengujian	924.000,00
Total Pendapatan Dibayar Dimuka			434.555.000,00

**Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0,00**

C.27 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan pengakuan kewajiban pemerintah karena adanya BAST barang dan/atau jasa dari pihak ketiga. Keseluruhan Utang yang Belum Ditagihkan bersumber dari kwitansi UP yang belum di GUP-kan. Adapun rincian Utang yang Belum Ditagihkan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Utang yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0,00**

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain-lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 bersumber dari transaksi atas utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetorkan. Berikut rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Tabel 56
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0.00
Jumlah	0,00	0,00	0.00

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Beban Yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,00**

C.29 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

**Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang
Rp0,00**

C.30 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. merupakan utang jangka Panjang yang jatuh tempo pembayarannya dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

**Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri
Rp0,00**

C.31 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi pemerintah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi pemerintah.

Ekuitas
Rp41.998.506.370,00

C.32 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp41.998.506.370,00** dan **Rp41.019.470.324**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Terdapat Kenaikan nilai ekuitas dari periode sebelumnya yaitu sebesar **2.39 persen**. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Pendapatan
Operasional
Rp4.995.740.780,00**

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.995.740.780,00 dan Rp4.303.498.038,00. Keseluruhan Pendapatan Operasional Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Operasional sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp692.242.742,00 atau sebesar 16,09 persen dari Pendapatan Operasional sampai dengan 31 Desember TA 2023. Hal ini disebabkan karena kenaikan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi. Selain itu terdapat Pendapatan lain yang menunjang peningkatan pendapatan berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan dan pendapatan yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan.

**Pendapatan
Perpajakan
Rp0,00**

D.1.1 Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan pada periode yang berakhir 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**Pendapatan PNPB
Rp4.995.740.780,00**

D.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp4.995.740.780,00** dan **Rp4.303.498.038,00**. Pendapatan Negara Pegawai mengalami kenaikan **16,09%** dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 57
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	T.A 2024	T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.441.780,00	6.748.288,00	(49,00)

Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	4.269.419.000,00	3.769.954.750,00	13,25
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	722.880.000,00	441.795.000,00	63,62
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0,00	85.000.000,00	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	0,00	100,00
Total PNBP	4.995.740.780,00	4.303.498.038,00	16,09
Jumlah	4.995.740.780,00	4.303.498.038,00	16,09

Pada Tahun Anggaran 2024, BSPJI Palembang tidak menggunakan Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Akibat penurunan Covid-19 di Indonesia, Pendapatan Negara Bukan Pajak di Lingkungan BSPJI Palembang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semua kegiatan Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi sudah berjalan secara normal. Selain itu, sejak awal tahun 2023, BSPJI Palembang mulai memberlakukan adanya pembayaran sewa rumah dinas kepada penghuni rumah dinas milik BSPJI Palembang sesuai dengan Permenperin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Tabel 58
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak pada
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Operasional	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.441.780,00	3.441.780,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	4.463.947.000,00	4.269.419.000,00	194.528.000,00

Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	722.880.000,00	722.880.000,00	0,00
Pendapatan Layanan Penelitian/Riset	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.905.000,00	0,00	3.905.000,00
Total PNBP	5.196.245.780,00	4.995.740.780,00	200.505.000,00
Jumlah	5.196.245.780,00	4.995.740.780,00	200.505.000,00

LRA adalah singkatan dari Laporan Realisasi Anggaran sementara LO adalah singkatan dari Laporan Operasional. LRA adalah laporan keuangan yang digunakan untuk memantau realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Sedangkan LO adalah laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan produktivitas suatu Satuan Kerja dalam menjalankan operasionalnya. LRA menggunakan basis Cash yang berarti semua transaksi keuangan yang terjadi diakui dan dicatat hanya saat uang benar-benar diterima atau dibayarkan, sedangkan LO menggunakan basis AkruaI yang berarti pendapatan diakui saat terjadi, meskipun uangnya belum diterima, dan biaya dicatat saat terutang, bahkan jika pembayaran belum dilakukan.

Pada tahun 2024, terdapat perbedaan antara LRA dan LO sebesar Rp200.505.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan LO menghitung selisih dari hasil pengurangan antara Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada tahun 2023 dan 2024. Pendapatan Diterima di Muka tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp221.264.000,00 dan Rp434.555.000,00. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp5.329.000,00 dan Rp24.092.000,00. Selisih ini tidak seharusnya menjadi pendapatan operasional pada tahun 2024.

Beban Operasional Rp19.255.374.677,00

D.2 Beban Operasional

Beban Operasional BSPJI Palembang periode yang berakhir 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp19.255.374.677,00 dan Rp16.785.033.623,00 yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan amortisasi. Rincian realisasi Beban Operasional dan perbandingan realisasi sampai dengan 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 59
Rincian Beban Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	9.837.145.484,00	7.958.779.944,00	23,60
Beban Persediaan	769.081.910,00	682.546.173,00	12,68
Beban Barang dan Jasa	3.079.954.948,00	3.053.680.612,00	0,86
Beban Pemeliharaan	987.388.284,00	1.233.386.544,00	(19,94)
Beban Perjalanan Dinas	2.498.324.008,00	2.130.249.282,00	17,28
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.083.480.043,00	1.726.391.068,00	20,68
Jumlah	19.255.374.677,00	16.785.033.623,00	14,72

Beban Operasional sampai dengan 31 Desember TA 2024 mengalami peningkatan sebesar 14,72 persen dari Beban Operasional sampai dengan 31 Desember TA 2023. Peningkatan terbesar atas Beban Operasional berasal dari peningkatan Beban Pegawai.

Beban Pegawai Rp9.837.145.484,00

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp9.837.145.484,00** dan **Rp7.958.779.944,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah

yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 60
Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.752.494.300,00	2.575.061.400,00	6,89
Beban Pembulatan Gaji PNS	44.224,00	44.715,00	(1,10)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	181.334.620,00	155.316.750,00	16,75
Beban Tunj. Anak PNS	54.363.646,00	49.363.826,00	10,13
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	401.352.000,00	275.760.000,00	45,54
Beban Tunj. PPh PNS	29.491.585,00	11.040.858,00	167,11
Beban Tunj. Beras PNS	146.867.760,00	145.853.880,00	0,70
Beban Uang Makan PNS	356.710.000,00	381.233.000,00	(6,43)
Beban Tunj. Umum PNS	28.740.000,00	59.920.000,00	(52,04)
Beban uang lembur PNS	251.206.000,00	201.462.000,00	24,69
Beban Pegawai (Tunj. Khusus)	4.212.829.210,00	3.822.206.245,00	10,22
Beban Gaji Pokok PPPK	486.585.000,00	86.057.400,00	465,42
Beban Pembulatan Gaji PPPK	7.915,00	1.102,00	618,24
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	23.714.220,00	4.202.440,00	464,30
Beban Tunjangan Anak PPPK	4.239.752,00	607.928,00	597,41
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	68.084.000,00	11.830.000,00	475,52
Beban Tunjangan Beras PPPK	22.884.720,00	4.345.200,00	426,67
Beban Uang Makan PPPK	86.262.000,00	22.476.000,00	283,80
Beban Uang Lembur PPPK	43.152.000,00	8.207.000,00	425,80
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegi	661.582.532,00	118.590.200,00	457,87

atan/Kinerja PPPK			
Total Beban Pegawai	9.837.145.484,00	7.958.779.944,00	23,60
Jumlah	9.837.145.484,00	7.958.779.944,00	23,60

Beban Pegawai mengalami Kenaikan sebesar 23,60% dibandingkan dengan tahun 2023. Berikut penjelasan terkait beban pegawai pada Tahun Anggaran 2024:

1. Terjadi Kenaikan beban pegawai dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan 13 pegawai PPPK dan 2 pegawai mutasi masuk ke BSPJI Palembang.
2. Dampak pandemi Covid-19 terhadap beban pegawai salah satunya dapat terlihat pada beban uang lembur. Hal ini dikarenakan BSPJI Palembang sudah menerapkan 100% pegawai WFO serta banyaknya pelaksanaan kegiatan perkantoran.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat perbedaan jumlah belanja pegawai pada LRA dan LO. Rincian perbedaan Belanja pegawai pada LRA dan LO disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 61
Rincian perbedaan Beban Pegawai pada LRA dan LO
Tahun Angagran 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	LRA (Belanja)	LO (Beban)	Selisih
Gaji Pokok PNS	2.752.494.300,00	2.752.494.300,00	0,00
Pembulatan Gaji PNS	44.224,00	44.224,00	0,00
Tunj. Suami/Istri PNS	181.334.620,00	181.334.620,00	0,00
Tunj. Anak PNS	54.363.646,00	54.363.646,00	0,00
Tunj. Struktural PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
Tunj. Fungsional PNS	401.352.000,00	401.352.000,00	0,00
Tunj. PPh PNS	29.491.585,00	29.491.585,00	0,00
Tunj. Beras PNS	146.867.760,00	146.867.760,00	0,00
Uang Makan PNS	346.960.000,00	356.710.000,00	(9.750.000,00)
Tunj. Umum PNS	28.740.000,00	28.740.000,00	0,00
uang lembur PNS	251.206.000,00	251.206.000,00	0,00
Pegawai (Tunj. Khusus)	3.918.830.061,00	4.212.829.210,00	(293.999.149,00)

Gaji Pokok PPPK	486.585.000,00	486.585.000,00	0,00
Pembulatan Gaji PPPK	7.915,00	7.915,00	0,00
Tunjangan Suami/Istri PPPK	23.714.220,00	23.714.220,00	0,00
Tunjangan Anak PPPK	4.239.752,00	4.239.752,00	0,00
Tunjangan Fungsional PPPK	68.084.000,00	68.084.000,00	0,00
Tunjangan Beras PPPK	22.884.720,00	22.884.720,00	0,00
Uang Makan PPPK	79.046.000,00	86.262.000,00	(7.216.000,00)
Uang Lembur PPPK	43.152.000,00	43.152.000,00	0,00
PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	644.662.832,00	661.582.532,00	(16.919.700,00)
Total Beban Pegawai	9.509.260.635,00	9.837.145.484,00	(327.884.849,00)

Berdasarkan Tabel 61 Terdapat selisih pada Uang makan PNS, Tunjangan Kinerja Pegawai, Uang makan PPPK, dan Tunjangan Kinerja PPPK dengan Jumlah Rp327.884.849,00. Pada Belanja LRA menghitung semua transaksi yang masuk dan keluar berdasarkan basis cash, sehingga tidak menghiraukan apakah transaksi tersebut bagian dari jurnal tahun anggaran yang lalu atau bukan, sedangkan LO sebaliknya.

Selisih LRA dan LO pada Uang makan PNS sebesar Rp9.750.000,00 merupakan hasil dari penjumlahan uang makan PNS bulan Desember yang masih harus dibayar. Dikarenakan LO menggunakan basis *Accrual* sehingga Jurnal tersebut diperhitungkan pada Laporan Operasional. Hal serupa juga berdampak pada Tunjangan Kinerja Pegawai, Uang makan PPPK, dan Tunjangan Kinerja PPPK. Selisih LRA dan LO pada Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp293.999.149,00 merupakan Tunjangan Kinerja PNS bulan Desember yang masih harus dibayar. Selisih pada Uang Makan PPPK sebesar Rp7.216.000,00 merupakan uang makan PPPK bulan Desember yang masih harus dibayar. Selisih pada Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp16.919.700,00 merupakan hasil dari jurnal Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember TA 2023 yang masih harus dibayar sebesar Rp34.095.550,00 dikurangi Jurnal tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember 2024 yang masih harus dibayar Rp51.015.250,00.

Beban Persediaan
Rp769.081.910,00

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp769.081.910,00 dan Rp682.546.173,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 pada tabel berikut ini.

Tabel 62
Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	250.439.435,00	165.800.642,00	51,05
Beban Persediaan bahan baku	502.942.941,00	511.895.800,00	(1,75)
Beban Persediaan Lainnya	15.699.534,00	4.849.731,00	223,72
Jumlah	769.081.910,00	682.546.173,00	12,68

Beban Persediaan mengalami kenaikan sebesar 12,68%. Kenaikan beban persediaan Lainnya pada BSPJI Palembang per 31 Desember 2024 meningkat drastis sebesar 223,72% dikarenakan adanya pembelian Alat test Kesehatan untuk pegawai. Pada Tahun Anggaran 2024 BSPJI Palembang tidak lagi mengalokasikan pagu persediaan Covid-19 untuk membeli Multivitamin, Handsanitizer dan Masker yang diberikan kepada pegawai. Hal ini dikarenakan tingkat Covid-19 pada tahun 2024 sudah menurun.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat perbedaan jumlah belanja persediaan pada LRA dan LO. Rincian perbedaan Belanja persediaan pada LRA dan LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 63
Rincian Perbedaan Persediaan pada LRA dan LO
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	LRA (Belanja)	LO(Beban)	Selisih
Persediaan Konsumsi	239.547.926,00	250.439.435,00	(10.891.509,00)
Persediaan bahan baku	570.605.711,00	502.942.941,00	67.662.770,00
Persediaan Lainnya	15.343.440,00	15.699.534,00	(356.094,00)
Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	20.970.068,00	0,00	20.970.068,00
Jumlah	846.467.145,00	769.081.910,00	77.385.235,00

Terdapat perbedaan sebesar Rp77.385.235,00 antara LRA dan LO. Nilai Beban Persediaan pada LO sebesar Rp769.081.910,00 merupakan beban persediaan yang diukur dan diakui berdasarkan penggunaan beban persediaan oleh satuan kerja selama Tahun Anggaran 2024. Sedangkan nilai Belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp846.467.145,00 merupakan belanja yang diukur dan diakui berdasarkan pada jumlah pembelian persediaan selama Tahun Anggaran 2024.

**Beban Barang dan
Jasa**
Rp3.079.954.948,00

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3.079.954.948,00** dan **Rp3.053.680.612,00**. Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 0,86% dibandingkan tahun 2023. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan Perkantoran	703.079.020,00	712.937.755,00	(1,38)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.552.000,00	47.396.675,00	(3,89)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	74.000,00	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	106.032.000,00	228.110.000,00	(53,52)
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Bahan	440.572.107,00	191.382.808,00	130,20
Beban Honor Output Kegiatan	16.000.000,00	20.800.000,00	(23,08)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	0,00	24.050.000,00	(100,00)
Beban Langganan Listrik	492.869.073,00	508.197.664,00	(3,02)
Beban Langganan Telepon	17.376.390,00	17.194.886,00	1,06
Beban Langganan Air	40.591.202,00	32.751.426,00	23,94
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	22.271.836,00	0,00	100,00
Beban Sewa	0,00	42.000.000,00	(100,00)
Beban Jasa Profesi	129.785.000,00	101.990.000,00	27,25
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	75.339.000,00	43.319.500,00	73,91
Beban Jasa Lainnya	990.487.320,00	1.083.375.898,00	(8,57)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	100.000,00	(100,00)
Total Beban Barang dan Jasa	3.079.954.948,00	3.053.680.612,00	(0,86)
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.079.954.948,00	3.053.680.612,00	(0,86)

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat perbedaan jumlah Belanja/Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO. Rincian perbedaan Belanja/Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 65
Rincian Perbedaan Belanja/Beban Barang dan Jasa
pada LRA dan LO
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	LRA (Belanja)	LO (Beban)	Selisih
keperluan Perkantoran	703.079.020,00	703.079.020,00	0,00
Penambah Daya Tahan Tubuh	45.552.000,00	45.552.000,00	0,00
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		0	0,00
Honor Operasional Satuan Kerja	106.032.000,00	106.032.000,00	0,00
Barang Operasional Lainnya		0	0,00
Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19		0	0,00
Bahan	440.572.107,00	440.572.107,00	0,00
Honor Output Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Barang Non Operasional Lainnya		0	0,00
Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel		0	0,00
Langganan Listrik	493.995.533,00	492.869.073,00	1.126.460,00
Langganan Telepon	17.594.691,00	17.376.390,00	218.301,00
Langganan Air	40.702.420,00	40.591.202,00	111.218,00
Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25.093.323,00	22.271.836,00	2.821.487,00
Sewa		0	0,00
Jasa Profesi	129.785.000,00	129.785.000,00	0,00
Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	75.339.000,00	75.339.000,00	0,00
Jasa Lainnya	990.487.320,00	990.487.320,00	0,00
Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin		0	0,00
Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		0	0,00
Total Barang dan Jasa	3.084.232.414,00	3.079.954.948,00	4.277.466,00
Jumlah	3.084.232.414,00	3.079.954.948,00	4.277.466,00

Terdapat perbedaan sebesar Rp4.277.466,00 antara LRA dan LO. Nilai Beban Barang dan Jasa pada LO sebesar Rp3.079.954.948,00 merupakan beban barang dan jasa yang diukur dan diakui berdasarkan penggunaan beban barang dan jasa oleh satuan kerja selama Tahun Anggaran 2024. Sedangkan nilai Belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp3.084.232.414,00 merupakan belanja yang diukur dan diakui berdasarkan pada jumlah pembelian persediaan selama Tahun Anggaran 2024.

Selisih pada Langganan Listrik sebesar Rp1.126.460,00

merupakan hasil pengurangan langganan listrik yang masih harus dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp40.983.609,00 dikurangi langganan listrik yang masih harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp39.857.149,00. Selisih ini dikarenakan langganan listrik tahun 2023 yang masih harus dibayar merupakan beban yang seharusnya masuk pada tahun 2023 tetapi dibayarkan pada tahun 2024, sehingga LRA dengan basis *cash* mencatat transaksi uang masuk pada tahun 2024, sedangkan LO dengan basis *Akrual* tidak mencatatnya pada tahun 2024. Hal ini juga terjadi pada transaksi beban telepon dan Air.

Selisih pada Langganan Telepon sebesar Rp218.301,00 merupakan hasil pengurangan langganan Telepon yang masih harus dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp1.490.492,00 dikurangi langganan Telepon yang masih harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp1.272.191,00. Selisih pada Langganan Air sebesar Rp111.218,00 merupakan hasil pengurangan langganan Air yang masih harus dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp 3.727.383,00 dikurangi langganan Air yang masih harus dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp3.616.165,00.

Terdapat selisih Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp2.821.487,00 yang merupakan *Prepaid* atau Belanja Barang dibayar Dimuka Aplikasi Wix.com dan RenderForest AI.

- **Beban Operasional untuk penanganan Pandemi Covid-19**

Pada Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 terdapat beban barang operasional-penanganan pandemi Covid-19 yang sudah tidak ada pagunya.

- **Beban Operasional untuk penanganan Pandemi Covid-Penanganan Ekonomi Nasional**

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat beban operasional untuk penanganan Pandemi Covid-19 Penanganan Ekonomi Nasional di BSPJI Palembang.

**Beban
Pemeliharaan
Rp987.388.284,00**

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember

2023 adalah masing-masing sebesar **Rp987.388.284,00** dan **Rp1.233.386.544,00**. Beban Pemeliharaan mengalami Penurunan **(19,94)%** dibandingkan tahun 2023. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penurunan kebutuhan pemeliharaan terhadap pemeliharaan gedung dan bangunan, persediaan untuk pemeliharaan, dan persediaan suku cadang. Pada Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat dampak Covid-19 terhadap beban pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	363.432.772,00	613.360.889,00	(40,75)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.178.045,00	539.268.609,00	8,70
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	25.498.368,00	19.784.806,00	28,88
Beban Persediaan suku cadang	12.279.099,00	60.972.240,00	(79,86)
Jumlah	987.388.284,00	1.233.386.544,00	(19,94)

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat perbedaan jumlah Belanja/Beban Pemeliharaan pada LRA dan LO. Rincian perbedaan Belanja/Beban Pemeliharaan pada LRA dan LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 67
Rincian Perbedaan Belanja/Beban Pemeliharaan Pada LRA dan LO
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	LRA (Belanja)	LO (Beban)	Selisih
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385.888.072,00	363.432.772,00	22.455.300,00

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	586.178.045,00	586.178.045,00	0,00
Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	25.498.368,00	(25.498.368,00)
Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.116.999,00	0,00	10.116.999,00
Persediaan suku cadang	0,00	12.279.099,00	(12.279.099,00)
Jumlah	982.183.116,00	987.388.284,00	(5.205.168,00)

Terdapat perbedaan sebesar Rp5.205.168,00 antara LRA dan LO. Nilai Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan pada LO sebesar Rp363.432.772,00 merupakan beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang sudah termasuk Jurnal bangunan Tempat Sampah sebesar Rp22.455.300,00. Hal ini disebabkan karena kesalahan penggunaan Akun belanja yang seharusnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sedangkan BSPJI Palembang menggunakan Akun Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Hal ini juga dilakukan karena Tidak terdapat Pagu Anggaran pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan selisih nilai Persediaan bahan untuk pemeliharaan, Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Persediaan suku cadang pada LRA merupakan belanja yang diukur dan diakui berdasarkan pada jumlah Belanja selama Tahun Anggaran 2024.

Beban Perjalanan Dinas
Rp2.498.324.008,00

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.498.324.008,00** dan **Rp2.130.249.282,00**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas meningkat **17,28 persen** dari tahun lalu dikarenakan meningkatnya frekuensi rapat koordinasi secara luar jaringan dan layanan jasa teknis baik pengujian sampel uji maupun sertifikasi produk sudah dilakukan

secara normal. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.337.237.424,00	1.986.281.850,00	17,67
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.986.584,00	37.740.000,00	56,30
Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	20.727.432,00	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.100.000,00	85.500.000,00	19,42
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.498.324.008,00	2.130.249.282,00	17,28

Pada Tahun Anggaran 2024 Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja/Beban Perjalanan Dinas pada LRA dan LO. Rincian perbedaan Belanja/Beban Perjalanan Dinas pada LRA dan LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 69
Rincian Belanja/Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	LRA (Belanja)	LO (Beban)	Selisih
Perjalanan Biasa	2.337.237.424,00	2.337.237.424,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.986.584,00	58.986.584,00	0,00
Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.100.000,00	102.100.000,00	0,00
Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.498.324.008,00	2.498.324.008,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara LRA dan LO. Hal ini dikarenakan untuk Transaksi perjalanan dinas dibayarkan secara *Realtime* sesuai dengan Surat Tugas yang sudah diterbitkan.

**Beban Barang
untuk diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0,00**

D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini BSPJI Palembang tidak memiliki Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024, tidak terdapat perbedaan antara LRA dan LO untuk Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat. Nilai Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada masyarakat pada LRA dan LO sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

**Beban Bantuan
Sosial Rp0,00**

D.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024, Tidak terdapat perbedaan antara LRA dan LO untuk Belanja/Beban Bantuan Sosial. Nilai Belanja/Beban Bantuan Sosial pada LRA dan LO sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

**Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.083.480.043,00**

D.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.083.480.043,00** dan **Rp1.726.391.068,00**. Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan **20,68%** dibandingkan tahun 2023. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2024. Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan dikarenakan adanya aset tetap peralatan dan mesin yang dilelang.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 70
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.445.179.354,00	1.104.188.664,00	30,88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	619.436.571,00	619.436.571,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	3.888.598,00	2.765.833,00	40,59
Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	14.975.520,00	0,00	100,00
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	2.083.480.043,00	1.726.391.068,00	20,68

Pada dasarnya, tidak terdapat Belanja Penyusutan dan Amortisasi di LRA. Hal ini dikarenakan LRA mengandung basis *Cash* yang dimana semua transaksi keuangan yang terjadi diakui dan dicatat hanya saat uang benar-benar diterima atau dibayarkan. Sehingga LRA hanya mencatat Nilai Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.540.867.094,00.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00

D.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
 (dalam rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Pada tahun 2024, Tidak terdapat perbedaan antara LRA dan LO untuk Belanja/Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai Belanja/Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada LRA dan LO sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional (Rp14.259.633.897,00)

D.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 sebesar (Rp14.259.633.897,00) dan (Rp12.481.535.585,00). Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih dari pendapatan operasional dan beban operasional yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Operasional 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 72
Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(14.259.633.897,00)	(12.481.535.585,00)	14,25
Jumlah	(14.259.633.897,00)	(12.481.535.585,00)	14,25

Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
(Rp24.443.875,00)

D.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **(Rp24.443.875,00)** dan **Rp54.485.964**. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari: Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar; Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang; dan Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pandemi Covid-19 tidak berdampak pada Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:

Tabel 73
Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset	2.072.000,00	61.234.567,00	(96,62)
Beban Pelepasan Aset	(30.420.875,00)	(37.121.211,00)	(18,05)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	3.905.000,00	30.372.608,00	(87,14)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(24.443.875,00)	54.485.964,00	(144,86)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **Rp2.072.000,00** merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan aset tetap peralatan dan mesin melalui lelang. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar **Rp3.905.000,00** merupakan penerimaan kembali belanja

pegawai tahun anggaran yang lalu atas perpindahan jabatan Umum ke pembina industri. Beban Pelepasan Aset N sebesar **(Rp30.420.875,00)** merupakan kerugian yang diperoleh karena adanya selisih nilai buku dengan nilai jual aset non lancar.

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 74
Rincian Beban Luar Biasa
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

Surplus/Defisit
Laporan
Operasional
(Rp14.284.077.772,00)

D.6 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember TA 2024 sebesar (Rp14.284.077.772,00) dan 31 Desember TA 2023 sebesar (Rp12.427.049.621,00)

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember TA 2024 dan 301 Desember TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 75
Rincian Surplus/Defisit Laporan Operasional
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Laporan Operasional	(14.284.077.772,00)	(12.427.049.621,00)	14,94
Jumlah	(14.284.077.772,00)	(12.427.049.621,00)	14,94

*Ekuitas Awal
Rp41.019.470.324,00*

*Surplus/Defisit LO
(Rp14.284.077.772)*

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Akuntansi
Rp0,00*

*Koreksi yang
menambah/
mengurangi Ekuitas
(Rp1.974.814,00)*

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,00*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp41.019.470.324,00** dan **Rp41.826.150.636,00**.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **(Rp14.284.077.772,00)** dan **(Rp12.427.049.621,00)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara Surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

E.4 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas berasal dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset tetap, koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya non Revaluasi, dan Koreksi Lain-lain. yang mana untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar **Rp0,00** yang merupakan Penyesuaian Nilai Aset. Koreksi Nilai Persediaan sebesar **Rp0,00**. Koreksi atas Reklasifikasi Sebesar Rp0. Selisih Revaluasi Aset tetap Sebesar **Rp0,00**. koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya non Revaluasi sebesar **(Rp1.974.814,00)** dan Koreksi Lain-lain sebesar **Rp0,00**. Pada 31 Desember 2023 koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas berasal dari koreksi nilai aset non revaluasi sebesar **Rp146.409.101,00** yang merupakan Koreksi Lain-lain.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

**Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00**

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**.

Tabel 76

Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	0,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0,00
3	Suku Cadang	0,00
4	Bahan Baku	0,00
5	Persediaan Lainnya	0,00
Jumlah		0,00

**Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00**

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya karena revaluasi nilai.

**Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00**

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2023 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan hasil penilaian kembali aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00** Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas tanah, Gedung dan Bangunan.

**Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
(Rp1.974.814,00)**

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2024 dan

31 Desember 2023 adalah sebesar **(Rp1.974.814,00)** dan **Rp146.409.101,00**. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tahun 2024 merupakan koreksi dari transaksi Reklasifikasi Masuk Portable Generating Set dari kodefikasi 3.06.03.47.002 (Alat Studio) menjadi 3.01.03.04.002 (Alat Besar)

Tabel 77
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi
Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Nilai
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	1.974.814,00	0	1.974.814,00
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Jumlah	(1.974.814,00)		

Koreksi Lain-Lain
Rp0,00

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan hutang. Pada tahun 2023 koreksi lain-lain merupakan pengembalian tunjangan struktural yang pindah jabatan ke Pembina Industri.

Tabel 78
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai
Koreksi Beban	0,00
Koreksi Pendapatan	0,00
Koreksi Piutang	0,00
Koreksi Kewajiban	0,00
Koreksi Hibah	0,00
Jumlah	0,00

Transaksi Antar Entitas
Rp15.265.088.632,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp15.265.088.632,00** dan **Rp11.473.960.208,00**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 79
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.461.334.412,00
Diterima dari Entitas Lain	(5.196.245.780,00)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	15.265.088.632,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar **(Rp5.196.245.780,00)** dan pada Periode 31 Desember 2023 sebesar **(Rp4.251.954.463,00)**.

E.5.2 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar **Rp20.461.334.412,00** dan pada Periode 31 Desember 2023 sebesar **Rp15.470.404.672,00**.

E.5.3 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan Transaksi penambahan aset yang disebabkan adanya pemindahan pencatatan dari satu

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)
(Rp5.196.245.780,00)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Rp20.461.334.412,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar
Rp0,00

entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp0,00** sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp255.509.999,00**. Tranfer Masuk pada 31 Desember 2023 sebesar Rp255.509.999,00 merupakan transfer masuk peralatan dan mesin berupa alat laboratorium sebanyak 2 buah dari BSKJI Kementerian Perindustrian.

Tabel 80
Rincian Transfer Masuk
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	0,00
2	Aset Tetap Lainnya	-	0,00
3	Persediaan	-	0,00
Jumlah			0,00

E.5.4 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan transaksi pengurangan aset karena adanya pemindahan pencatatan dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar **Rp0,00** sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00**.

Tabel 81
Rincian Transfer Keluar
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	0,00
2	Aset Tetap Lainnya	-	0,00
3	Persediaan	-	0,00
Jumlah			0,00

Pada masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2024 tidak terdapat Transfer masuk dan Transfer Keluar yang termasuk dalam kategori penanganan pandemi covid-19 atau Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu, tidak ada dampak yang mempengaruhi TK/TM.

**Pengesahan Hibah
Langsung dan
Pengembalian
Pengesahan Hibah
Langsung Rp0,00**

E.5.5 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan

Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00**. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah **Rp0,00**.

Tabel 82
Rincian Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung
Per 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	-	-	0,00
2	-	-	0,00
3	-	-	0,00
Jumlah			0,00

- Rincian Pengesahan Hibah Langsung atas Aset dalam rangka penanganan Pandemi COVID-Pemulihan Ekonomi Nasional**

Pada masa pandemi Covid-19 tahun anggaran 2024 tidak terdapat hibah langsung atas aset yang termasuk dalam kategori penanganan pandemi covid-19 atau Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu, tidak ada dampak yang mempengaruhi Pengesahan Hibah.

Ekuitas Akhir

Rp41.998.506.370,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp41.998.506.370,00** dan **Rp41.019.470.324,00**.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Tahun Anggaran 2024 ini tidak ada kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 SK Pengelola Keuangan APBN

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Nomor 251 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun Anggaran 2024. Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Pengelola Dipa Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun Anggaran 2024. Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendaharawan, Penyusun LK SAIBA, Penyusun LK SIMAK BMN pada Satker Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang.

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Arya Yudistira
Pejabat Pembuat Komitmen RM	:	Febri Guswandi
Pejabat Pembuat Komitmen PNBP	:	Tri Susanto
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Nurmayanti
Bendahara Pengeluaran	:	Delfy Carissa
Bendahara Penerimaan	:	Dhelia Damayanty S
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	:	Muchammad Mutho'
Penyusun LK SAIBA	:	Anggriyanti
Penyusun LK SAIBA	:	Mefta Hulzanah
Penyusun LK SIMAK BMN	:	Muhammad Fa'iqula
Penyusun LK SIMAK BMN	:	M. Nurhidayat Abdillah

F.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja per 31 Desember 2024 sebesar Rp134.625.000,00 merupakan sisa tambahan uang persediaan yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2024. Sisa tambahan uang persediaan dimaksud telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2025 sesuai dengan NTPN 9DE7D7NAPH18PMV0.

F.2.3 Capaian Output

Merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja (Perkin) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang merupakan bentuk komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan Rencana Strategis BSPJI Palembang 2020-2024, dan sesuai dengan telah ditetapkan tujuan Kementerian Perindustrian sampai dengan tahun 2024, yaitu "Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional". Adapun indikator kinerja BSPJI Palembang sebagai berikut

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	30	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan
		2	Tingkat Kepuasan Perusahaan Yang Diberikan Fasilitasi Industri 4.0	3	Indeks
		3	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	2	Perusahaan
		4	Tingkat Kepuasan Perusahaan Yang Diberikan Fasilitasi di Bidang Standardisasi Industri	3	Indeks

3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi (DAPATI)	40	Persen
		2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	5	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	50	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	95	Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	4	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	76	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	91	Nilai

Capaian kinerja Anggaran BSPJI Palembang pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan aplikasi SMART DJA yaitu sebesar 97,93. Rincian Capaian Kinerja dan Capaian Output dapat dilihat pada Lampiran.